

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP TATA KELOLA UNIVERSITAS  
LAMPUNG (*GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE*)**

**(Skripsi)**

**Oleh  
BAIHAKE**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **STUDENTS' PERCEPTIONS TO GOVERNANCE OF LAMPUNG UNIVERSITY (GOOD *UNIVERSITY GOVERNANCE*)**

**By:  
BAIHAKE**

Governance of higher education become every important issue in order to realize the quality of their education services more optimal. During this time, the governance at University of Lampung is still less well proven from UKT management at University of Lampung. Therefore, this study aims to determine students' perceptions of governance in university of Lampung (good university governance) by looking at the six indicators such as, transparency, accountability, responsibility, independency, fairness, and participation.

This research uses descriptive quantitative method. Sampling technique in this research is purposive sampling. Data is collected from the questionnaire as many as 95 respondents who are active students in eight faculties. and from in-depth interviews with some of the student leaders at University of Lampung.

The results show that in the aspect of transparency of student perceptions to be positive by percentage of totaly 74,53%, accountability aspect of student

perceptions to be positive by percentage of totaly 59,47%, responsibility aspects of students' perceptions to be negative by percentage of totaly 57,71%, independency aspect of student perceptions to be positive by percentage of totaly 70,79%, fairness aspects of perceptions students to be negative by percentage of totaly 64,63% , and the participatory aspect of students' perceptions to be positive by percentage of totaly 60,52%.

Related assessment of transparency aspect, accountability aspect, independency aspect, and participation aspect to be positive rate. And responsibility aspect and fairness aspect to be negative. Overall, the students' perceptions to ward governance of university of Lampung show positive perceptions.

**Keywords: Good university governance, student perceptions**

## **ABSTRAK**

### **PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP TATA KELOLA UNIVERSITAS LAMPUNG (*GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE*)**

**Oleh  
BAIHAKI**

Tata kelola perguruan tinggi menjadi isu yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kualitas layanan pendidikan yang semakin optimal. Selama ini tata kelola di Universitas Lampung masih kurang baik terbukti dari pengelolaan UKT di Universitas Lampung. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap tata kelola Universitas Lampung (*good university governance*) dengan melihat pada enam indikator yaitu, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran, dan partisipasi.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. data yang terkumpul berasal dari pembagian kuesioner sebanyak 95 responden yang merupakan mahasiswa aktif di delapan fakultas di Unila, di perjelas dengan hasil wawancara mendalam dengan beberapa tokoh mahasiswa di lingkungan Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek transparansi sebagian besar responden mahasiswa menilai positif ditunjukkan dengan persentase sebanyak 74,53% responden menilai positif, aspek akuntabilitas persepsi mahasiswa positif ditunjukkan dengan persentase 59,47% responden menilai positif, aspek tanggung jawab persepsi mahasiswa negatif ditunjukkan dengan persentase sebanyak 57,71% responden menilai negatif, aspek independensi persepsi mahasiswa positif ditunjukkan dengan persentase sebanyak 70,79% responden menilai positif, aspek kewajaran persepsi mahasiswa negatif ditunjukkan dengan persentase sebanyak 64,63% responden menilai negatif, dan aspek partisipasi persepsi mahasiswa positif ditunjukkan dengan persentase sebanyak 60,52% responden menilai positif.

Penilaian responden terhadap enam indikator konsep *good university governance*, untuk indikator transparansi, akuntabilitas, independensi dan partisipasi responden menilai positif dan indikator tanggung jawab dan kewajaran menilai negatif pelaksanaannya. Secara keseluruhan persepsi mahasiswa terhadap tata kelola universitas lampung menunjukkan persepsi positif.

**Kata kunci: Tata kelola universitas, persepsi mahasiswa.**

**PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP TATA KELOLA UNIVERSITAS  
LAMPUNG (*GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE*)**

Oleh  
**BAIHAKI**

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN  
pada  
Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

**Judul Skripsi : PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP TATA KELOLA UNIVERSITAS LAMPUNG (GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE)**

**Nama Mahasiswa : BAIHAKI**

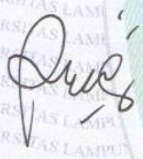
**Nomor Pokok Mahasiswa : 1216021024**

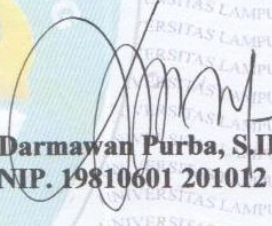
**Jurusan : Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

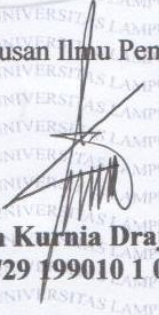
**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Dr. Feni Rosalia, M. Si.**  
**NIP. 19690219 199403 2 001**

  
**Darmawan Purba, S.IP.,M.IP**  
**NIP. 19810601 201012 1 003**

**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

  
**Drs. Denden Kurnia Drajat, M. Si.**  
**NIP. 19600729 199010 1 001**



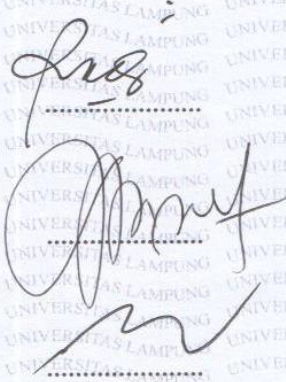
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Feni Rosalia, M. Si**

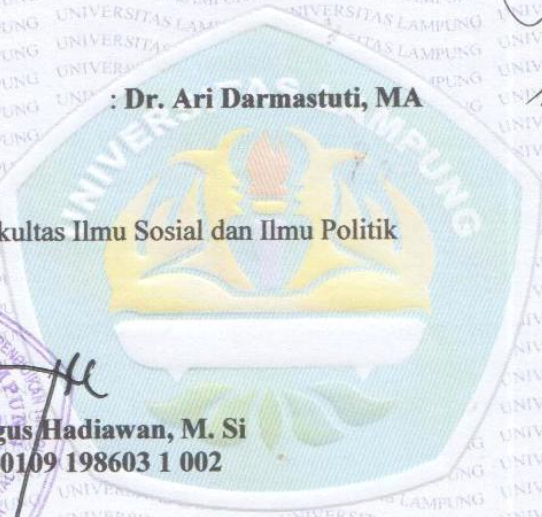
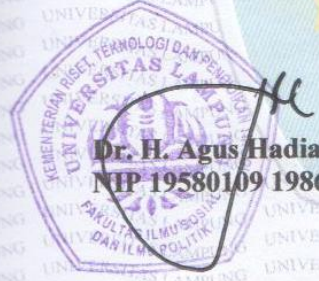
**Sekretaris : Darmawan Purba, S.IP.,M.IP**

**Penguji : Dr. Ari Darmastuti, MA**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Dr. H. Agus Hadiawan, M. Si**  
**NIP 19580109 198603 1 002**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juli 2016**



## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai bahan acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Juli 2016  
Yang Membuat Pernyataan,



Baihaki  
NPM. 1216021024

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Baihaki, lahir di Kotaagung pada Tanggal 10 Maret 1994. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Rohimi dan Ibu Armida. Penulis merasa sangat beruntung dan bersyukur karena memiliki orang tua yang hebat serta keluarga yang harmonis. Berkat do'a, dukungan dan semangat dari orang tua dan keluarga besar maka penulis bisa melanjutkan tahap pendidikan yang lebih tinggi. Hal inilah yang mendasari penulis untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua dan mengutamakan keluarga.

Masa pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Kampung Baru, Kotaagung Timur pada tahun 2000-2006, kemudian pada tahun 2006-2009 penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Kotaagung Timur. Selanjutnya pada tahun 2009-2012 penulis tempuh di SMAN 1 Kotaagung. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur PMPAP pada tahun 2012. Selama kuliah penulis sempat aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan yaitu UKM KOIN UNILA pada tahun 2013 sebagai Sekretaris Bidang Pengabdian Masyarakat, dan LSSP CENDEKIA FISIP UNILA pada tahun 2013 sebagai anggota muda.

## MOTTO

*Tuntutlah Ilmu, Tapi Tidak Melupakan Ibadah  
Dan Kerjakanlah Ibadah, Tapi Tidak Boleh Lupa Pada Ilmu  
(Hassan Al Bashri)*

*Janganlah Kamu Berputus Asa dari Rahmat Allah  
Sesungguhnya Allah Mengampuni Dosa-dosa Semuanya  
(QS. Az-Zumar Ayat 53)*

*Teman Sejatinya Ia Yang Meraih Tangan Anda  
dan Menyentuh Hati Anda  
(Heather Pryor)*

Proses Itu Tentang Waktu, Kuat Bertahan Itulah Kemajuan  
(Baihaki)

## *PERSEMBAHAN*

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Alhamduillahirabbil'alamiin, telah Engkau Ridhai Ya Allah langkah hambaMu,  
Sehingga skripsi ini pada akhirnya dapat diselesaikan*

dan

*Ku Persembahkan Karya Kecil Ini Untuk Yang  
Menyayangiku*

*Ayah dan Ibu tercinta*

Tauladan yang selalu menjadi sumber inspirasi didalam kehidupanku  
Terima kasih atas segala cinta, pengorbanan, kesabaran, keikhlasan, dan do'a  
dalam menanti keberhasilanku

*Kakak, Abang, Adik Tersayang*

Saudara sekaligus sahabat terbaik  
Terimakasih telah menjadi teman untuk bertukar pikiran, berbagi cerita dan  
selalu memotivasiku untuk sukses

*Keluarga besar yang senantiasa  
mendukungku selama ini*

*Sahabat Yang Selalu memberi warna  
dalam Hidupku*

*Almamater Tercinta Universitas Lampung*

## SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Persepsi Mahasiswa Terhadap Tata Kelola Universitas Lampung (*Good University Governance*)**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna., sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis.

Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M. Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Feni Rosalia, M. Si. selaku Pembimbing Utama Skripsi, serta selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua Penulis, yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terimakasih banyak untuk semua kata-kata khidmat yang membuat Penulis berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik.



4. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP selaku Pembimbing Pembantu Skripsi, yang telah banyak memberikan masukan, kritik-saran dan memotivasi serta seringkali mengajak berdiskusi untuk membuka pikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Ari Darmastuti, MA. selaku pembahas dan penguji yang telah memberikan kritik dan saran kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Staf Akademik, Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak sekali membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
8. Kedua orang tuaku, Ayahanda Rohimi dan Ibunda Armida yang senantiasa berdoa dan berusaha keras dalam segala keterbatasan untuk menjadikan Penulis sebagai seorang anak yang berpendidikan. Semoga ilmu yang didapatkan bisa menjadi bekal untuk membahagiakan Ayahanda dan Ibunda.
9. Kakak-kakakku Riwaida, bang andre, bang abdan, adekku tersayang Deni dan Ponakan Resta Ardelia. Terimakasih untuk keceriaan yang kalian ciptakan ketika penulis sedang mengalami kelelahan dan kepenatan. Semoga kalian bisa melampaui jauh capaian yang telah abang capai.
10. Keluarga uwa M. Rusdi, wa Zaina, wo Zainnur, odo Yahnu, odo Ruzwan, Ucu, ponakanku Nasuha, Afkar Terimakasih menjadi orang tua kedua

selama ini, telah memberikan tempat singgah dan memberikan bantuan, motivasi saat Penulis menyelesaikan Perkuliahan.

11. Keluarga besarku Alak Marhaddin, alak Marsanah, wo Eva, kak Yunida, bang Heri, uwa Musni, Dalom Yazid Terimakasih menjadi orang tua kedua selama ini, Terimakasih banyak bantuannya selama ini.
12. Seluruh Informan Mahasiswa Universitas Lampung yang telah berkenan membantu penulis dalam melakukan serangkaian kegiatan penelitian.
13. Sahabat-sahabatku, sahabat seperjuangan: Melyansyah S.IP, Nekroma, Hanafi, Ranga Perdana, Yoga Pratama JP, Wahyu N, Winda Dwiastuti Herman S.IP, Ananda Putri S.IP, Marliyani, M.Fajar Imani, Rian Rinanda, Rizky Arie Kurniawan, Saiful Zuhri, Yoga S, Nasira, Ubi, Eri, Maya, Dedek, Arif, dan Jeki R, yang telah memberikan dukungan, canda tawa serta banyak cerita selama berjuang bersama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
14. Sahabat dan teman bertukar pikiran, Lintang Yunita Afriana dan Iis yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan, kritik-saran untuk kebaikan bersama. Terimakasih banyak telah banyak membantu dalam pelaksanaan Seminar Usul dan Hasil Penelitian.
15. Teruntuk yang belum sempat memiliki, mengenalmu adalah anugerah.
16. Sahabat dan teman Masa Remaja, Ovika, Sanah, Mega, Nanda, Delvin, Ahmad Yani, Agung(Gede), Agung L, Marwan, Aan, Naning, Rita dan Veri. Terimakasih yang telah banyak memberi dan membuat senyuman manis dalam masa remajaku.

17. Teman-teman KKN Desa Marga Jaya, Kecamatan Meraksa Aji Kabupaten Tulang Bawang (Bang Fitra S.H., Ika Meytasari, Siti Maryani, Tiara Kartika, bang Gede), Lurah, Bang Dodi, Pak Samakun, bukde siti dan Maya. Terimakasih untuk pengalaman, kebersamaan dan motivasinya yang membuat Penulis berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga silaturahmi tetap terjalin.

18. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2012.

19. Adik-adik di Jurusan Ilmu Pemerintahan: Danang Marhaens, Rian Adi Saputra, Syaifulloh, Kenn Sindy KJ, Restiani Damayanti, Vivi Alvionita, Fina Ria Tisa, Nadia Maudyna, Risky Nitha, Ipnika Nurfasari, Pita, Deya, Citra, Chan.. Terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 22 Juli 2016

Baihaki

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>GAMBAR</b> .....	v
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vi
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Persepsi.....	13
1. Pengertian Persepsi.....	13
2. Sifat-sifat Persepsi.....	14
3. Faktor-faktor mempengaruhi Persepsi.....	16
4. Proses Terjadinya Persepsi.....	18
5. Bentuk-bentuk Persepsi.....	18
B. Definisi Mahasiswa.....	19
C. Tata Kelola Pendidikan Tinggi.....	22
D. Konsep <i>Good Governance</i> .....	26
1. <i>Good Governance</i> .....	26
2. <i>Good Corporate Governance</i> .....	30
3. <i>Good University Governance</i> .....	33
E. Kerangka Pikir.....	41
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Definisi Konseptual.....	43
D. Definisi Operasional.....	44
E. Populasi dan Sampel .....	47
F. Jenis dan Sumber Data .....	52
G. Teknik Pengumpulan Data .....	53
H. Teknik Pengolahan Data.....	56
I. Skala Pengukuran .....	57
J. Teknik Analisis Data.....	58
k. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	61

<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Universitas Lampung .....	64
B. Filosofi Universitas Lampung.....	66
C. Visi Misi Universitas Lampung .....	69
D. Organisasi Universitas Lampung .....	71
E. Gambaran Umum Universitas Lampung .....	74
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Responden .....	77
B. Hasil	
1. Persepsi Mahasiswa Terhadap Tata Kelola Universitas Lampung ( <i>Good University Governance</i> ) .....	80
2. Kategori Persepsi Mahasiswa Terhadap Tata Kelola Universitas Lampung ( <i>Good University Governance</i> ).....	118
C. Pembahasan.....	119
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan .....	137
B. Saran .....	139

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1. Daftar Biaya UKT Unila Tahun 2015-2016.....		4
2. Jumlah Mahasiswa Banding UKT Tahap Pertama Tahun 2015 .....		5
3. Survei Kondisi Fasilitas Unila Tahun 2015 .....		8
4. Survei Pelayanan Administrasi Unila Tahun 2015 .....		9
5. Penelitian Terdahulu .....		10
6. Indikator Operasional Variabel Persepsi Mahasiswa.....		46
7. Jumlah Sampel Responden Berdasarkan Angkatan.....		51
8. Jumlah Sampel Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....		51
9. Kategori Persepsi Mahasiswa Terhadap Tata Kelola Unila (Good University Governance) .....		61
10. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....		77
11. Identitas Responden Berdasarkan Angkatan.....		78
12. Identitas Responden Berdasarkan Umur .....		79
13. Unila Sudah Memberikan Kemudahan Dalam Mengakses Informasi. 81		81
14. Akses Informasi Lingkungan Unila Sudah Tepat, Akurat dan Jelas... 82		82
15. Unila Menjalin kerja Sama Dengan Media Massa Atau Lembaga Non Pemerintah Dalam Peningkatan Sistem Informasi Kampus .....		84
16. Kerja Sama Unila Dengan Media Massa Atau Lembaga Non Pemerintah Membuat Sistem Informasi Kampus Lebih Baik.....		85
17. kebijakan Yang Diambil Unila Sudah Diinformasikan Dengan Baik . 86		86
18. Unila Sudah Menyampaikan Informasi Setiap Penyeleggaran Kampus Secara Cepat dan Tepat.....		87
19. Unila Memberikan Pelayanan Memuaskan Terhadap Mahasiswa ..... 89		89
20. Unila Mampu Mempertanggung Jawab Setiap Kebijakan Yang Diambil Secara Profesionial .....		90
21. Unila Melaksanakan Manajemen Monitoring internal Dengan Baik .. 92		92
22. Setiap Unit Kerja Dilingkungan Unila Membuat Laporan Pertanggung jawaban Atas Pelaksanaan Tugasnya.....		93
23. Unit Kerja Dilingkungan Unila Memiliki Rencana Kerja Yang Jelas. 94		94
24. Unila Sudah Mampu Membangun Suasana Akademik Yang Kondusif Dalam Mendukung Proses Pembelajaran.....		96
25. Unila Sudah Memiliki Sarana Prasarana Pembelajaran Lengkap, Nyaman Dan Modern .....		97
26. Pengelolaan Dana Keuangan Di Unila Dikelola Dengan Baik.....		98

27. Unila Sudah Tepat Dalam Mengalokasikan Dana Sesuai Dengan Kebutuhan Universitas .....	99
28. Setiap Unit kerja Dilingkungan Unila Sudah Melaksanakan dan Memiliki Uraian Tugas Yang Jelas dari Setiap Pejabat Struktural Kampus .....	100
29. Unila Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Kepada Masyarakat.....	101
30. Unila Melaksanakan Peran dan Tanggung Jawabnya Bebas dari Intervensi Pihak Manapun .....	103
31. Unila Pengambilan Kebijakan Berdasarkan Kepentingan Kampus.....	104
32. Setiap Unit Kerja Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsinya Berpedoman dan Sesuai Peraturan Dengan Baik.....	105
33. Antar Rekan Kerja Di Unila Terjalin Kerja Sama Sinergis .....	106
34. Unila Memberi Pelayanan Setara Wajar Terhadap Pihak Manapun...	108
35. Fasilitas Yang Diberikan Sesuai Tingginya UKT Mahasiswa.....	109
36. Unila Dalam Penentuan Golongan UKT Sudah Tepat Sasaran .....	110
37. Unila Menerapkan Sistem Profesionalisme Dalam Menerima Dosen, Karyawan Dan Mahasiswa.....	111
38. Unila Menerapkan <i>Reward dan Punishment</i> Kesemua Pihak Tanpa Adanya Diskriminasi.....	112
39. Unila Terbuka Menerima Kritik dan Saran Dari Pihak Manapun .....	113
40. Unila Menjamin Kebebasan Akademik Bagi Dosen, Karyawan, Dalam Memberikan Masukan Dan Kritik Sesuai Dengan Keahliannya .....	115
41. Unila Menyediakan Sarana Pengaduan Dalam Menampung Keluhan Dari Mahasiswa.....	116
42. Unila Melibatkan Semua Pihak Dalam Pengambilan Kebijakan.....	117
43. Keseluruhan Kategori Penilaian Positif dan Negatif .....	118
44. Keseluruhan Kategori Persepsi Aspek Transparansi .....	120
45. Keseluruhan Kategori Persepsi Aspek Akuntabilitas .....	123
46. Keseluruhan Kategori Persepsi Aspek Responsibilitas.....	126
47. Keseluruhan Kategori Persepsi Aspek Independensi.....	129
48. Keseluruhan Kategori Persepsi Aspek Kewajaran.....	131
49. Keseluruhan Kategori Persepsi Aspek Partisipasi .....	134

**GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir .....	41

## DAFTAR SINGKATAN

BAN-PT	: Badan Akreditasi Negara-Pendidikan Tinggi
BEM U KBM	:Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Unila
GCG	: Good Corporate Governance
GUG	: Good University Governance
KESMA	: Kesejahteraan Mahasiswa
PMPAP	: Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan
PT	: Perguruan Tinggi
SDM	: Sumber Daya Manusia
SPI	: Sumbangan Pengembangan Institusi
SPP	: Sumbangan Penunjang Pendidikan
UKT	: Uang Kuliah Tunggal
UM	: Ujian Mandiri
UNDP	: United Nations Development Program
UNILA	: Universitas Lampung
BAK	: Bidang Akademik

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan bagian dari investasi sumber daya manusia. Pendidikan menjadi batu loncatan dalam menentukan peluang bagi seluruh warga negaranya untuk belajar dan mengembangkan potensi tertinggi tiap individu dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. Semakin tinggi pendidikan yang di tempuh semakin tinggi juga peluang setiap individu untuk memperoleh pekerjaan yang didambakan. Perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan tertinggi dalam sistem pendidikan formal di Indonesia, yang nantinya dituntut dapat menghasilkan tenaga-tenaga ahli profesional dibidangnya dan berdaya saing tinggi.

Adapun konsep yang banyak di tawarkan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi adalah konsep *Good University Governance (GUG)*. Konsep ini merupakan konsep turunan dari konsep *Good Corporate Governance (GCG)* yang berawal dari tata pemerintahan yang baik yaitu *good governance*. Prinsip-prinsip dasar dari *good governance* yang masih relevan untuk diterapkan dalam konsep GUG. Penyelenggaraannya harus memenuhi beberapa prinsip yang diterapkan berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 63 mengharuskan pengelolaan perguruan



tinggi yaitu berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, *responsibility*, independensi, *fairness*, penjamin mutu, efektifitas dan efisiensi, serta nirlaba.

GUG telah diterapkan di Universitas Lampung (Unila) sejak diterapkannya visi Unila untuk menjadi perguruan tinggi sepuluh terbaik di Indonesia pada tahun 2025. Keberhasilan Unila dalam mencapai salah satu perguruan tinggi terbaik sangat ditentukan oleh tata kelola universitas yang baik (GUG), sarana dan prasana yang memadai serta diiringi proses belajar yang handal dan standar tinggi. Penerapan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik secara konsisten dan berkesinambungan dapat meningkatkan mutu serta pelayanan akademik dan non akademik dalam menciptakan nilai tambah universitas dan daya saing yang tinggi. Peran GUG untuk membentuk struktur kerja serta *check and balance*.

Prinsip tata kelola yang baik tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan dan ketentuan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan universitas yang baik yang tidak hanya melibatkan pimpinan. Penerapan GUG bukan hanya mencakup relasi pengelolaan universitas melainkan adanya relasi sinergis seajar. Universitas atau perguruan tinggi merupakan organisasi nirlaba yang tidak bertujuan mencari keuntungan (*profit oriented*), namun harus tetap mendapatkan dukungan finansial untuk menjalankan operasional sivitas akademiknya. Hakikatnya universitas harus mampu menghidupi dirinya sendiri dan dapat mengembangkan kelembagaannya dengan baik.

Tidak dipungkiri mahasiswa selalu menjadi objek bagi perguruan tinggi sebagai salah satu sumber pendanaan universitas, misalnya dalam hal dana Sumbangan Penunjang Pendidikan (SPP) yang meningkat setiap tahun ajaran baru. Terlebih lagi sejak diterapkannya sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada perguruan tinggi. Ada beberapa indikasi belum terpenuhinya standar GUG di Unila terlihat dari beberapa contoh kasus yang bisa di temui berdasarkan informasi dari wawancara yang peneliti lakukan selama prariset, pertama, permasalahan transparansi UKT; akuntabilitas mengenai dana SPI; responsibilitas mengenai sarana prasarana kurang memadai, parkir terbatas, dan keamanan; indepedensi serta kewajaran dalam pengelompokan UKT.

Implementasi kebijakan UKT sejak tahun 2013 telah menimbulkan permasalahan baru. UKT diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013, tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri. Sistem ini mengharuskan pembayaran biaya selama masa studi dibagi rata per semester sehingga tidak ada uang pangkal. UKT dilakukan dengan cara pengelompokan atau penggolongan sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa.

**Tabel 1. Daftar Biaya UKT Unila Tahun 2015-2016**

No	Kelompok UKT	Biaya UKT/persemester
(1)	(2)	(3)
1	Kelompok I	RP. 0 (Gratis)
2	Kelompok II	RP. 1.000.000
3	Kelompok III	RP. 2.400.000 - 3.000.000
4	Kelompok IV	RP. 3.600.000 - 9.300.000
5	Kelompok V	RP. 4.700.000 - 16.000.000
6	Kelompok VI	RP. 5.900.000 - 23.000.000

Sumber: [www.kemdiknas.go.id](http://www.kemdiknas.go.id) (data diolah sendiri oleh penulis).

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa biaya UKT terendah pada kelompok I diperuntukan bagi mahasiswa dari jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP) di mana tidak dibebankan biaya kuliah selama 8 semester. Biaya UKT kelompok II mulai dari RP.1.000.000 dan biaya UKT tertinggi sebesar Rp.23.000.000. Membandingkan biaya kuliah saat ini terjadi ketimpangan lebih tinggi dibandingkan sebelum diterapkannya sistem UKT pada tahun 2012, dimana semua biaya SPP mahasiswa di samakan sebesar Rp.1.300.000 terkecuali untuk mahasiswa jalur Ujian Mandiri (UM). Sejak sistem UKT diterapkan terjadi ketimpangan yang 20 kali lipat lebih tinggi dengan biaya SPP sebelum UKT diterapkan.

Permasalahan yang muncul adalah ketidaksesuaian penggolongan dan cenderung belum tepat sasaran. Ketidaksesuaian penggolongan dapat terlihat dengan adanya mahasiswa yang melakukan banding UKT, Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Universitas Lampung Nomor 2/33/UN26/KU/2014 tentang penetapan besarnya UKT berdasarkan hasil verifikasi ulang semester genap tahun 2014 pada mahasiswa sarjana, mengabulkan permohonan 189

mahasiswa yang meminta diturunkan biaya UKT sebanyak satu grade dari UKT sebelumnya. Seperti yang termuat dalam berita online oleh [bandarlampungku.com](http://bandarlampungku.com) tentang UKT 189 mahasiswa Unila diturunkan satu tingkat (diakses pada tanggal 5 November 2015, pukul 14.23 WIB).

**Tabel 2. Jumlah Mahasiswa Banding UKT Tahap Pertama Tahun 2015**

No	Fakultas	Jumlah Mahasiswa Banding	Hasil Banding	
			UKT Turun	UKT Tetap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ekonomi	24	18	6
2	Fkip	101	63	38
3	Mipa	65	1	64
4	Fisip	12	12	0
5	Pertanian	47	15	32
6	Teknik	14	12	2
7	Kedokteran	3	2	1
	Jumlah	266	123	143

Sumber: BEM U KBM Unila (Data diolah sendiri oleh penulis)

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa dari 266 mahasiswa yang melakukan banding UKT melalui Menteri Kesejahteraan Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Unila (KESMA BEM Unila), sebanyak 123 mahasiswa yang diturunkan sebanyak satu grade dari kelompok UKT sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan asisten menteri KESMA BEM Unila. Ada beberapa indikasi dasar terjadi ketidaktepatan penentuan golongan UKT. Pertama, tidak adanya transparansi dari pihak rektorat mengenai indikator dan penilaian dalam penentuan UKT. Penempatan seorang mahasiswa dapat digolongkan masuk kedalam golongan tertentu tidak dijelaskan secara pasti.

Kedua, dorongan nepotisme dalam penentuan golongan oleh pihak yang berkepentingan dalam hal ini mahasiswa titipan pejabat, dosen, karyawan Unila. Ketiga, kesalahan dalam teknis memasukan data pribadi oleh mahasiswa itu sendiri yang disebabkan rasa malu jika digolongkan sebagai mahasiswa ekonomi lemah ataupun mahasiswa yang memanipulasi data pribadi dan menjelma menjadi mahasiswa ekonomi lemah dadakan.

Semenjak diterapkannya sistem UKT pada tahun 2013, Unila menerapkan dana Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) bagi mahasiswa jalur UM penerimaan Paralel. Setiap mahasiswa melalui jalur UM dan Paralel bersedia memberikan dana SPI dengan besaran tinggi yang telah ditetapkan Unila. Dana sumbangan penerimaan mahasiswa UM dan Paralel yang memberikan sumbangsih besar dalam pemasukan keuangan unila. Dana SPI diperuntukan untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu dan menunjang fasilitas kampus.

Penerimaan mahasiswa melalui jalur UM dan Paralel berdampak pada setiap tahunnya mahasiswa Unila selalu bertambah jumlahnya hingga melebihi kapasitas daya tampung kampus. Kampus tidak berkembang, ruang kuliah sempit, belum mampu menampung peserta perkuliahan bahkan mahasiswa harus meminjam kursi dari kelas lain. Ditambah lagi fasilitas AC yang minim bahkan tidak berfungsi menambah suasana perkuliahan tidak nyaman (**Teknokra**, halaman 10 edisi November 2015).

Selain fenomena di atas, tata kelola Unila juga belum mencerminkan prinsip-prinsip GUG yaitu transparansi, akuntabilita, responsibilitas, independensi

dan kewajaran. Prinsip-prinsip GUG tersebut belum bisa ditegakkan secara maksimal karena masih banyak kekurangan diberbagai bidang terkait lima prinsip tersebut. Pertama, transparansi dalam sistem UKT dimana terjadi ketidak sesuaian dan cenderung kurang tepat sasaran pengelompoak UKT setiap mahasiswanya dan transparansi permasalahan dana SPI mahasiswa paralel selama ini belum jelas di alokasikannya. Kedua, akuntabilitas dalam hal pelaporan dana SPI mahasiswa paralel berkaitan dengan alokasi keuangan untuk kepentingan mahasiswa kurang ada publikasi.

Ketiga, Responsibilitas berdasarkan masalah sarana prasarana yang kurang memadai, pelayanan lahan parkir yang terbatas tidak sebanding dengan pertambahan jumlah mahasiswa setiap tahunnya. Pelayanan bidang keamanan yang kurang terjamin terlihat dari adanya enam kali laporan kehilangan sepeda motor selama bulan Oktober sampai November. Pelayanan administrasi Unila yang masih berbelit-belit dan cenderung mempersulit mahasiswa. Keempat, Independensi dalam hal penetapan UKT, penerimaan beasiswa dan penerimaan mahasiswa baru yang tidak berlandaskan pada faktor kekeluargaan atupun mahasiswa titipan dosen atau pejabat lainnya.

Kelima, Kewajaran dalam menangani permasalahan fasilitas yang didapat mahasiswa yang membayar lebih mahal tetapi cenderung disamaratakan dan fasilitas yang tidak sesuai dengan mahalnya biaya UKT yang dibayarkan, penunjang proses pembelajaran yang kurang memadai seperti AC kurang, ruangan kuliah sempit, dan LCD yang kurang memadai (**Teknokra**, halaman 5 edisi November 2015).

**Tabel 3. Survei Kondisi Fasilitas Unila tahun 2015**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Persentase %</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	lebih buruk	5
2	sama buruk	26,7
3	sama baik	29,2
4	lebih baik	25
5	tidak tahu	14,2
	Jumlah	100

Sumber: Diadopsi dari dokumen tabloid Teknokra No.145 edisi November 2015

Berdasarkan tabel 2, dapat dijelaskan bahwa dari hasil survei mengenai kondisi fasilitas Unila terhadap 120 responden mahasiswa terdiri dari angkatan 2010, 2011, 2012, 2013 yang diambil secara acak dari setiap jurusan atau program studi di delapan fakultas. Terdapat sebanyak 5% responden menyatakan lebih buruk, 26,7% sama buruk, 29,2% responden sama baik, 25% menyatakan lebih baik, dan 14,2% menyatakan tidak tahu.

Selain permasalahan tersebut, terdapat juga komponen pelayanan prima yang tentunya penting untuk diterapkan. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan harapan dan kepuasan mahasiswa. Peningkatan kualitas program akademik, kualitas sumber daya manusia, kualitas sarana dan prasarana, serta suasana akademik yang mendukung. Harus di realisasikan dengan sistem tata kelola yang baik atau berkualitas.

**Tabel 4. Survei Pelayanan Administrasi Unila Tahun 2015**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Persentase %</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1	lebih buruk	5
2	sama buruk	25,8
3	sama baik	30
4	lebih baik	25
5	tidak tahu	20,8
	Jumlah	100

Sumber: Diadopsi dari dokumen tabloid Teknokra No.145 edisi November 2015.

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa dari hasil survei mengenai kondisi fasilitas Unila terhadap 120 responden mahasiswa terdiri dari angkatan 2010, 2011, 2012, 2013 yang diambil secara acak dari setiap jurusan atau program studi di delapan fakultas. Terdapat sebanyak 5% lebih menilai lebih buruk, 25,8% menilai sama buruk, 30% menilai sama baik, 25% menilai lebih baik dan 20,8% menyatakan tidak tahu. Keberhasilan Unila untuk mencapai sepuluh universitas terbaik sangat dipengaruhi terlaksananya tata kelola universitas yang baik (GUG). Penerapan GUG harus menjadi komitmen seluruh sivitas akademika dan karyawan.



Tabel 5. Penelitian Terdahulu

No (1)	Nama (2)	Judul (3)	Hasil (4)
1.	Anggara Kusuma (2011)	Penerapan Prinsip-Prinsip Good University Governance (Studi di Lingkungan Universitas Lampung Tahun 2010)	Penelitian ini lebih fokus pada tiga aspek partisipasi, akuntabilitas dan transparansi. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa Universitas Lampung dalam hal partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi belum mampu menerapkannya sebab penerapannya yang dilakukan hanya sebatas pada pihak-pihak yang berkepentingan didalamnya atau hanya untuk kalangan terbatas.
2.	Ahmad Dahro (2013)	Good University Governance dalam Perspektif <i>New Institutionalism</i> (Studi pada Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung)	Prinsip-prinsip dasar GUG sepenuhnya diterapkan oleh pimpinan kepada mahasiswa, namun minimnya keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam proses pembuatan aturan formal lembaga, mengindikasikan implementasi prinsip-prinsip GUG terutama pada prinsip transparansi, penegakan aturan, partisipasi komunitas dan respons terhadap berbagai aturan formal belum sepenuhnya di terapkan. Sebaiknya aturan formal lembaga (statuta dan pedoman akademik, SOP) wajib dilaksanakan di setiap unit-unit secara transparan, ditegakkan secara tegas dan melibatkan semua komponen.
3.	Y Sebastian (2012)	Prinsip-Prinsip Good University Governance Berbadan Hukum Yayasan di Indonesia	Penerapan GUG universitas yang dibawah naungan yayasan, seharusnya dipahami oleh pihak universitas bukan hanya sebagai kewajiban melainkan kebutuhan dasar dengan tidak menyampingkan hak-hak pemangku kepentingan( <i>stakeholder</i> ). Komponen-komponen GUG harus diterapkan secara kesinambungan tanpa mengenyampingkan salah satu komponen. Karena seluruh komponen saling berkaitan.

Berdasarkan fenomena tersebut menarik dikaji secara komprehensif dalam sebuah penelitian dari persepsi mahasiswa, berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas bagaimana persepsi mahasiswa terhadap tata kelola Universitas Lampung melihat dari penerapan konsep GUG. Melihat dari sudut pandang hak mahasiswa memperoleh layanan publik sesuai ketentuan yang berlaku dan memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka kelancaran proses belajar.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah persepsi mahasiswa Universitas Lampung terhadap tata kelola Universitas Lampung berdasarkan konsep *Good University Governance*?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi mahasiswa Universitas Lampung terhadap tata kelola Universitas Lampung dalam perspektif *Good University Governance*.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu kajian terhadap fenomena-fenomena/gejala-gejala dalam

pengelolaan suatu universitas dalam persektif *Good University Governance*, khususnya tentang persepsi mahasiswa terhadap tata kelola suatu universitas dilihat dari sudut pandang konsep *Good University Governance*, dan sumbangan pemikiran bagi penulis lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih.

## **2. Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait mengenai persepsi mahasiswa Universitas Lampung terhadap tata kelola Universitas Lampung (*Good University Governance*.)
2. Manfaat untuk mahasiswa, yaitu untuk menambah referensi untuk mahasiswa lain jika suatu saat akan dilakukan penelitian lagi dengan tema yang sama.
3. Manfaat untuk karyawan atau staf, yaitu untuk melihat tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kualitas layanan di Universitas Lampung yang dapat dijadikan bahan dalam meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Persepsi**

#### **1. Pengertian Persepsi**

Munculnya persepsi didasari atas pengalaman atau peristiwa tertentu yang telah dialami individu sebelumnya. Menurut Walgito (2010: 99), persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.

Thoha (2004: 141) menyatakan bahwa persepsi adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci utama dalam memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi sebagai suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar dalam situasi.

Selanjutnya Mar'at (1981: 21) menyatakan persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi (perasaan emosional, suka tidak suka, simpati, rasa takut atau tidak takut). Aspek penggerak perubahan karena informasi yang diterima akan menentukan perasaan dan kemauan untuk berbuat. Sehingga komponen kognisi akan mempengaruhi seseorang untuk bertindak senang atau tidak terhadap suatu objek yang merupakan jawaban atau pertanyaan apa yang dipikirkan untuk dipersepsikan tentang objek tersebut.

Kemudian Quinn dalam Sarwono (2012: 93) menyatakan bahwa Persepsi merupakan proses kombinasi dari sensasi yang diterima oleh organ dan hasil interpretasinya (hasil olahan otak). Bentuk, struktur dan rasa yang diterima merupakan sensasi sedangkan perbandingan yang terjadi adalah interpretasi.

Berdasarkan beberapa pengertian persepsi yang dikemukakan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa persepsi adalah proses seseorang untuk melihat dan memahami fenomena yang dialami disekitarnya yang diterima alat indera, kemudian diolah di dalam otak, melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki sehingga mampu memberikan kesan positif maupun negatif.

## **2. Sifat-sifat Persepsi**

Menurut Sendjaya (1993: 42) dalam Mardiasuti (2012: 9) menyatakan bahwa sifat-sifat persepsi sebagai berikut:

a. Persepsi adalah pengalaman, untuk mengartikan makna dari seseorang, objek, atau peristiwa tersebut.

b. Persepsi adalah selektif

Memersepsikan biasanya seseorang hanya memerhatikan bagian-bagian tertentu dari objek berdasarkan atas sikap, nilai dan keyakinan yang ada didalam diri yang bersangkutan dan mengabaikan karakteristik yang tidak relevan atau berlawanan dengan nilai dan keyakinan tersebut.

c. Persepsi adalah penyimpulan

Proses psikologi dan persepsi mencakup penarikan kesimpulan melalui sesuatu proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi pada dasarnya penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Dengan kata lain memersepsikan makna adalah melompat dari suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data yang dapat ditangkap indera.

d. Persepsi bersifat tidak akurat

Setiap persepsi yang dilakukan akan mengundang kesalahan dalam keadaan tertentu, yang disebabkan oleh pengaruh masa lalu, seksifitas dan penyimpulan.

e. Persepsi bersifat evaluatif

Menyatakan bahwa persepsi berupa perhatian tidak akan terjadi persepsi. Perihal ini menyatakan bahwa untuk dapat menyimpulkan persepsi dibutuhkan beberapa proses yang harus dilakukan melalui proses kealaman atau proses fisik, fisiologis dan psikologis.

### 3. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi

Faktor-faktor ini dapat terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan atau target dalam konteks situasi di mana persepsi itu dibuat. Edgar dan James L. dalam Thoha (2004: 147) adapun faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan persepsi seseorang yaitu:

#### a. Psikologi

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu di dunia ini sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologis. Misalnya, indahnya matahari tenggelam disaat senja akan dirasakan sebagai bayang-bayang kelabu bagi orang yang buta warna.

#### b. Keluarga

Keluarga memiliki pengaruh sangat besar dalam perkembangan anak-anaknya. Orang tua mempunyai cara khusus dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya.

#### c. Kebudayaan

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam memengaruhi sikap, nilai, dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini.

Menurut David krech (Rakhmat (2005: 55) ada dua faktor yang menentukan persepsi seseorang yaitu:

a. Faktor fungsional

Bahwa persepsi bersifat selektif fungsional dimana objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi, biasanya objek yang melakukan persepsi dipengaruhi oleh faktor fungsional meliputi:

1. Kebutuhan

Kebutuhan sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Hakikatnya kebutuhan-kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi.

2. Kesiapan Mental

Kesiapan mental seseorang akan memengaruhi persepsi seseorang.

3. Suasana Emosi

Suasana emosi seseorang baik dalam keadaan sedih, bahagia, gelisah maupun marah akan sangat memengaruhi persepsinya terhadap budaya.

4. Latar Belakang

Latar belakang asal seseorang akan memengaruhi dan menentukan persepsi seseorang tersebut pada suatu objek rangsangan.



b. Faktor Struktural

Faktor struktural semata-mata berasal dari stimulus fisik dan efek-efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu yang dalam hal ini erat kaitanya dengan fokus usia.

#### **4. Proses terjadinya persepsi**

Menurut Walgito (2010: 102) mengatakan proses terjadinya persepsi melalui objek yang menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus yang diterima alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu mampu menyadari apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang diraba sebagai proses psikologis. Namun, tidak semua stimulus mendapatkan respon untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon bergantung pada perhatian yang dilakukan.

#### **5. Bentuk-bentuk persepsi**

Persepsi secara umum merupakan hasil tanggapan terhadap suatu objek yang dilihat. Persepsi yang terbentuk sebagai pandangan dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang yang dapat disimpulkan sebagai persepsi positif dan persepsi negatif. Sebagaimana diungkapkan David O Sears (Rakhmat (2005: 53) dengan demikian dapat diketahui ada dua bentuk persepsi yaitu:

a. Persepsi Positif

Persepsi positif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menuju pada suatu keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menerima objek yang ditangkap karena sesuai dengan pribadinya.

b. Persepsi Negatif

Persepsi negatif yaitu persepsi atau pandangan terhadap suatu objek dan menunjukkan pada keadaan dimana subjek yang mempersepsikan cenderung menolak objek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya.

## **B. Definisi Mahasiswa**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat 15, mengatakan mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi. Bahwasanya mahasiswa itu sebenarnya hanya sebutan akademis untuk siswa/murid yang telah sampai pada jenjang pendidikan tertentu dalam masa pembelajarannya.

Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan profesional. Mahasiswa harus mampu mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau

Teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya (Pasal 13 ayat 2).

Adnan (1999: 76) dalam Prisina (2014: 23) mengatakan bahwa mahasiswa merupakan kelompok generasi muda elit dalam masyarakat yang mempunyai keberanian, kepeloporan, sifat dan watak yang kritis. Berperan sebagai kekuatan moral dan berfungsi sebagai kontrol sosial serta sebagai duta-duta pembaharu masyarakat. Menurut Juliantara dalam Silahi (2004: 04) mengatakan universitas/ perguruan tinggi merupakan dunia akademisi yang memiliki pemikiran kritis dengan pola pikir yang lebih terbuka dalam memandang suatu fenomena yang ada dalam masyarakat.

Kemudian Adnan (1999: 131) dalam Prisina (2014: 24) mengklasifikasikan mahasiswa dalam lima tipe, yaitu:

1. Kelompok idealis konfrontatif

Kelompok ini merupakan mahasiswa yang aktif dalam kelompok diskusi atau lembaga swadaya masyarakat, tipe kelompok ini cenderung berpikiran kritis terhadap perkembangan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta teori yang mendasarinya. Tipe kelompok cenderung aktif didalam aksi-aksi demonstrasi dalam memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas.

2. Kelompok idealis realistik

Tipe kelompok ini juga aktif diberbagai diskusi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Kelompok ini lebih banyak menggagas ide-ide perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok ini cenderung kompromistis dan kooperatif, mereka terang-terangan menentang

pemerintah tetapi berusaha mencari jalan di tengah kesumpekan iklim politik di tanah air.

3. Kelompok oportunist

Kelompok ini lebih menunjukkan keberpihakannya kepada penguasa, kelompok ini terdiri dari mahasiswa yang berkecenderungan untuk mendukung program-program pemerintah dan berpihak pada pemerintah.

4. Kelompok profesional

Kelompok ini merupakan para mahasiswa yang berorientasi profesional dan kurang berminat terhadap masalah ekonomi, politik, bangsa. Kelompok cenderung memilih untuk menyelesaikan studi secepat mungkin, kemudian memperoleh pekerjaan yang dapat menjamin masa depannya.

5. Kelompok glamour

Tipe kelompok ini merupakan para mahasiswa yang kurang berminat terhadap masalah ekonomi, politik, bangsa, perbedaannya mereka cenderung rekreatif. Ciri yang menonjol dari tipe kelompok ini adalah kemampuan berbusana yang cenderung glamour dan gaya hidupnya yang selalu mengikuti mode.

Berdasarkan beberapa pembahasan perihal mahasiswa yang dikemukakan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mahasiswa adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu di sebuah perguruan tinggi yang memiliki intelektual lebih dan memiliki jiwa pembaharuan serta pemikiran kritis terhadap fenomena-fenomena sosial yang ada untuk disikapi.

### C. Tata kelola Pendidikan Tinggi

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan diartikan sebagai pendidikan yang dilaksanakan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi menjadi sumber inovasi dan solusi bagi pertumbuhan dan perkembangan bangsa seiring dengan berkembangnya zaman.

Pendidikan tinggi memiliki tujuan dan fungsi yang penting dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat. Menurut Alma (2008: 22) Saat ini penataan sistem pendidikan tinggi di Indonesia mengenai paradigma baru pendidikan tinggi meliputi (a) Peningkatan mutu yang berkelanjutan, (b) Azas otonomi sebagai daya gerak untuk membuat sistem yang lebih dinamis, (c) Akuntabilitas agar otonomi yang terselenggara secara bertanggung jawab, (d) Akreditasi untuk menjamin mutu lulusan, (e) Evaluasi diri agar proses pengambilan keputusan dalam perencanaan didasarkan atas data dan informasi empiris. Perlu dirumuskan visi misi perguruan tinggi yang mengikat dan visioner.

visi pendidikan tinggi Indonesia adalah (a) mencerdaskan kehidupan bangsa, (b) mengembangkan masyarakat ilmiah, (c) memelihara, mengembangkan, dan menyebarkan kebudayaan berlandaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta (d) membangun manusia Indonesia seutuhnya yang bertaqwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berpikir dan bersikap ilmiah,

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan luas dan berkelanjutan.

Misi perguruan tinggi Indonesia adalah (a) menghasilkan anggota masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, berpikir dan bersikap ilmiah, meningkatkan kemampuan akademik dan status profesional dan mengembangkan ilmu pengetahuan, (b) Menghasilkan ilmu dan teknologi baru, (c) Menyebarkan hasil penelitian terapan, kaji tindak (*action research*) agar bermanfaat bagi masyarakat (diakses <http://www.dikti.co.id>).

Perguruan tinggi yang ideal dalam hal ini mampu melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mempunyai dosen-dosen yang berkompeten dibidangnya dan konsisten dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok perguruan tinggi. Menurut Brodjonegoro (Alma (2008: 101) dalam meningkatkan daya saing dan mutu perguruan tinggi adalah (a) kuantitas dan kualitas serta relevansi lulusan, (b) kualitas dan relevansi penelitian dan pengembangan, dan (c) kuantitas dan relevansi kegiatan pengabdian masyarakat.

Salah satu wacana penting pendidikan tinggi adalah persoalan tata kelola perguruan tinggi yang kerap dikaitkan dengan isu komersialisme, privatisasi dan sebagainya. Sementara pengaturan yang menjamin dan mengatur dan mengawasi pemenuhan hak, serta pengaturan sistem tata kelola dengan prinsip GUG ini masih lemah

Tata kelola perguruan tinggi yang baik menentukan kemajuan suatu perguruan tinggi. Tata kelola perguruan tinggi sebagai bagian dari mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu universitas agar operasional universitas berjalan sesuai harapan semua pihak yang berkepentingan serta memberi nilai tambah universitas secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Menurut Djanali (2005: 7) menyatakan bahwa tata kelola adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu PT untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tata kelola merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya proses kesejajaran, kesamaan, kohesi, dan keseimbangan peran, serta adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen terkait. Secara teknis tata kelola dinyatakan sebagai upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi, melalui fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan tindak lanjut peningkatan. Dengan demikian, tata kelola selain melingkupi seluruh proses dan unsur-unsur tersebut, juga memiliki tujuan utama yaitu peningkatan kualitas PT secara terus menerus untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

Tata kelola akan berjalan baik apabila dibarengi dengan suasana akademik dan budaya organisasi yang kondusif, kesemuanya itu akan terbentuk secara bertahap. Paradigma tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), pada saat ini menjadi pilihan handal untuk mencapai sukses organisasi. Secara umum tata kelola terkait dengan aspek transparansi,

akuntabilitas, kepemimpinan, komitmen dan sebagainya. Namun tata kelola menjadi persoalan lebih pelik, manakala tuntutan tata kelola yang baik mengharuskan adanya perubahan dan inovasi dari sistem yang ada dalam mencapai visi dan misi perguruan tinggi.

Secara umum, apabila suatu perguruan tinggi sedang berupaya untuk meningkatkan kesehatan dan kinerjanya, maka tata kelola yang baik merupakan prasyarat. Sistem tata kelola merupakan bagian integral dari tanggungjawab pimpinan perguruan tinggi, termasuk di dalamnya adalah fakultas/ jurusan/ bagian/program studi, dosen, dan karyawan. Oleh karena itu, sistem tata kelola harus menyentuh seluruh aras organisasi perguruan tinggi.

Banyak unsur atau komponen perguruan tinggi yang harus dikonsolidasikan dan diberdayakan, agar perguruan tinggi mampu mengembangkan kualitas pelayanan secara terus menerus, untuk sukses mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Unsur-unsur strategis yang harus dikonsolidasikan, diberdayakan maupun ditingkatkan antara lain kualitas program akademik, kualitas sumberdaya manusia, kualitas sarana prasarana, dan suasana akademik yang mendukung. Namun kehendak untuk dapat meningkatkan kualitas unsur-unsur tersebut, harus didukung dengan metode untuk merealisasikannya yaitu sistem tata kelola yang baik atau berkualitas.

Salah satu pertimbangan dalam memilih perguruan tinggi melalui penilaian kinerja perguruan tinggi, seperti yang diungkapkan Miller (Alma (2008: 98) menyatakan 10 elemen yang menjadi indikator, yaitu (a) *goal and objectives*,



(b) *student learning*, (c) *faculty performance*, (d) *academic programs*, (e) *institutional support services*, (f) *administrative leadership*, (g) *financial management*, (h) *governing board*, (i) *external realitions*, dan (j) *institusinal self-improvement*.

Perguruan tinggi yang sehat adanya sistem administrasi yang teratur dan terorganisir dengan baik. Mampu menciptakan mahasiswa yang berjiwa wirausaha, serta perguruan tinggi yang mampu mengembangkan potensi sumber daya yang ada sehingga mampu mengangkat perekonomian nasional. Proses penerimaan mahasiswa transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan.

#### **D. Konsep Good Governance**

##### **1. Good Governance**

Perkembangan paradigma *governance* didorong adanya runtun masalah yang menuntut perubahan, baik dibidang lingkungan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Menurut Tjokroamidjojo (2000: 34) bahwa *Governance* berarti memerintah, menguasai, mengurus, dan mengelola. Istilah *governance* tidak hanya dipandang sebagai pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga didalamnya terdapat proses pengelolaan, pengurusan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan ataupun jalannya pemerintah. *Governance* dalam perkembangannya mengandung arti pemerintahan, sedangkan dalam prakteknya lebih dikenal dengan istilah pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Menurut *OECD dan World Bank* dalam Sedarmayanti (2013: 273)

menyatakan bahwa:

“*Good governance* sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka pikir politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas usaha”.

United Nations Development Program (UNDP) dalam Sedarmayanti

(2013: 270) menyatakan bahwa:

“*Good governance* sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholders, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumberdaya seperti sumberdaya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas”.

Konsep *good governance* pada awalnya merupakan istilah ilmu politik yang diperkenalkan dalam menggambarkan suatu masyarakat yang demokratis. Istilah ini semakin populer ketika badan-badan internasional dalam bidang moneter mempersyaratkan adanya suatu pemerintahan yang baik terhadap lembaga-lembaga moneter tersebut dalam memberikan bantuan.

*Asian Development Bank* sendiri menegaskan bahwa *good governance* dilandasi oleh 4 pilar yaitu *accountability, transparency, predictability, dan participation*. Atas dasar inilah, maka UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *Good Governance* yaitu:

- a. Partisipasi. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakilkan kepentingannya.
- b. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk azazi manusia.
- c. *Transparency*. Tranparansi di bangun atas dasar kebebasan arus informasi yang berkaitan dengan kepentingan pubik secara langsung dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan.
- d. *Responciveness*. Lembaga-lembaga dan propses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders
- e. *Concensus Orientation*. *Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- f. *Equity*. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- g. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- h. *Accountability*. Para pembuatan keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders.

- i. *Strategic Vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Menurut Tjokroamidjojo (2000) dalam Sedarmayanti (2013: 285) terdapat lima prinsip *good governance* yaitu: Akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, kepastian hukum dan jaminan. Sedangkan menurut Mustopadidjaja (1997) dalam Sedarmayanti (2013: 284) mengatakan prinsip *good governance* terdiri dari demokrasi dan pemberdayaan, pelayanan, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi, kemitraan, desentralisasi, dan kepastian hukum.

Jadi, secara sederhana *good governance* merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat yang saling berinteraksi dalam mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif.

Sementara itu berkaitan dengan perusahaan lebih dikenal dengan istilah *corporate governance*, walaupun dalam segi prinsip-prinsip yang dikandung berbeda satu sama lain, namun ada persamaan mendasar diantar keduanya. Persamaan ini terletak pada dasar *governance* yaitu perlu adanya kontrol berdasarkan aturan terhadap para pimpinan/pengurus, melihat stakeholder yang sangat variatif sulit diharapkan dapat mengontrol pengurus yang bertanggung jawab atas kegiatan sehari-hari.

## 2. *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan struktur yang oleh stakeholder, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja menurut OECD dalam Zarkasyi (2008: 35). *Good corporate governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparansi dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Cadbury Committe dalam Busyra (2011: 177) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut:

“*Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya”.

Menurut Syakhroza (2003), GCG sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisiensi, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Penerapan GCG menurut Zarkasyi (2008: 36) perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa.

GCG dimaksudkan untuk mengatur hubungan berbagai pihak yang berkepentingan dan mencegah kesalahan dalam strategi perusahaan dan kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Menurut Zarkasyi (2008: 38) Adapun yang menjadi dasar prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran.

#### 1. Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan prosedur pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

#### 2. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

#### 3. Responsibilitas

Kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab terhadap peraturan dan lingkungan sehingga dapat dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

#### 4. Independensi

Keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak saling mendominasi dan tidak dapat intervensi oleh pihak lain.

#### 5. Kesetaraan dan Kewajaran

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasrakan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Berdasarkan penjelasan menurut para ahli diatas, peneliti dapat menyimpulkan GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan dalam mengelola dan mengontrol perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka waktu panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Konsep ini relevan untuk diadopsi dalam pengelolaan suatu perguruan tinggi sebagai bagian dari mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu universitas. Berkaitan dengan pendidikan tinggi konsep ini lebih dikenal dengan *good university govenance (GUG)*, dalam hal ini yang membedakan penyerapan dan penerapan nilai- nilai dan tujuan yang ingin dicapai.

### 3. *Good University Governance*

GUG merupakan sebuah konsep yang muncul karena kesadaran bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dan institusi perguruan tinggi memang tidak dapat disamakan dengan penyelenggaraan sebuah negara atau perusahaan. Menurut Wijatno (2009: 126), secara sederhana GUG dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip dasar konsep *good governance* dalam sistem dan proses *governance* pada institusi perguruan tinggi melalui berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi. GUG merupakan langkah yang dapat menunjang pencapaian kualitas suatu perguruan tinggi.

Menurut Wijatno (2009: 119), pencapaian *GUG* dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Sedangkan menurut rumusan Sutiono (2004) dalam Djanali (2005: 14) yang dipandang cocok untuk diterapkan dalam perguruan tinggi yaitu: Transparansi, pengorganisasian, partisipasi, responsivitas, efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas dan kepemimpinan. Penelitian ini mencoba menerapkan Prinsip-prinsip dari kedua ahli tersebut sebagai pijakan dan acuan. Berikut ini prinsip-prinsip GUG menurut Wijatno (2009) dan Sutiono (2004) yang dipandang cocok untuk diterapkan dalam perguruan tinggi yang dimodifikasi, yaitu:



a. Transparansi

Keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Serta informasi-informasi penting lainnya secara memadai, akurat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan ada.

Menurut Andrianto (2007) transparansi merupakan ketersediaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya serta menjamin akses bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Dalam hal ini penulis menggunakan indikator menurut Krina (2003) indikator-indikator transparansi sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya, dan tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi
3. Menyusun mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerja sama melalui media massa dan lembaga non pemerintah.

Sedangkan menurut Muhi (2011) indikator transparansi sebagai berikut:

1. Transparansi proses pengambilan keputusan.
2. Transparansi kepada mitra kerja.

### 3. Transparansi penilaian kinerja pegawai.

#### b. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif. Universitas harus mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas (tertulis) dari pejabat struktural. Kriteria dan proses pengukuran kinerja, pengawasan dan pelaporan harus ada audit internal dalam rangka penilaian kerja untuk tujuan mengevaluasi dan mengendalaikan aktivitas organisasi.

Menurut Krina (2003) Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Krina menjelaskan indikator-indikator akuntabilitas sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan kegiatan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan yang diambil secara proporsional.
4. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa
5. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.

6. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Sedangkan menurut Wijatno (2009) indikator-indikator akuntabilitas yaitu:

1. Mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap pejabat struktural.
2. Mempunyai kriteria dari setiap uraian tugas dan tanggung jawab dan proses pengukuran kinerja, pengawasan dan pelaporan.
3. Tugas dan ruang lingkup audit internal diuraikan secara jelas.

c. Responsibilitas

Menurut Djanali (2005: 15) mengatakan bahwa responsibilitas yaitu merupakan sejauh mana kebijakan, regulasi, dan pengalokasian anggaran mendapat dukungan dan tanggapan positif dari sivitas akademika. Kesesuaian didalam pengelolaan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap individu yang berkaitan dalam pengelolaan universitas harus bertanggung jawab atas segala tindakannya sesuai dengan tugas fungsi yang telah ditetapkan.

Menurut Djanali (2005) indikator yang dapat digunakan yaitu:

1. Membangun suasana akademik yang kondusif.
2. Memanfaatkan dana dengan kehati-hatian sesuai dengan tujuan pemberi dana.
3. Menghasilkan inovasi untuk pengembangan ekonomi.

4. Menjamin kebebasan akademis bagi seluruh staff dalam memberikan masukan sesuai dengan keahliannya.
5. Membentuk profesional-profesional atau disiplin ilmu yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai keunggulan dari universitas.

Menurut Zarkasyi (2008: 40) indikator responsibilitas yang dapat digunakan yaitu:

1. Adanya pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang dalam setiap organisasi yang jelas.
2. Adanya ketepatan dan kecepatan pelayanan yang diberikan.
3. Melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

d. Independensi

Menurut Zarkasyi (2008: 40) Keadaan dimana organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Pengelola universitas dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab harus bebas dari bentuk intervensi dari pihak manapun. Hal ini untuk memastikan keputusan yang diambil bebas dari tekanan dan dibuat hanya untuk kepentingan universitas. Menurut Zarkasyi (2008: 40) indikator yang dapat digunakan yaitu:

1. Pengambilan keputusan perguruan tinggi perlu terpisah dari pemerintah atau badan hukum nirlaba yang memilikinya sehingga terbebas dari benturan kepentingan didalamnya.
2. Menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun.
3. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

e. Kewajaran

Menurut Zarkasyi (2008: 38) Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangan yang berlaku. Saat melaksanakan kegiatannya, universitas harus senantiasa memperhatikan kepentingan mahasiswa dan pemengku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Menurut Zarkasyi (2008: 38) indikator yang dapat digunakan yaitu:

1. Universitas memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada universitas.
2. Universitas memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, mahasiswa, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa adanya diskriminasi.
3. Penerapan *reward dan Punishment* kesemua pihak tanpa adanyadiskriminasi.

#### f. Partisipasi

Menurut Krina (2003) partisipasi merupakan prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentang sejauh mana proses pengambilan keputusan strategis PT melibatkan secara partisipatif *stakeholders* eksternal dan internal, sehingga *stakeholders* dapat mendukungnya secara aktif. Menurut Krina (2003) indikator-indikator partisipasi sebagai berikut:

1. Terdapat akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
2. Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang representatif, jelas, dan terbuka.
3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi.
4. Pengambilan keputusan melibatkan semua pihak.

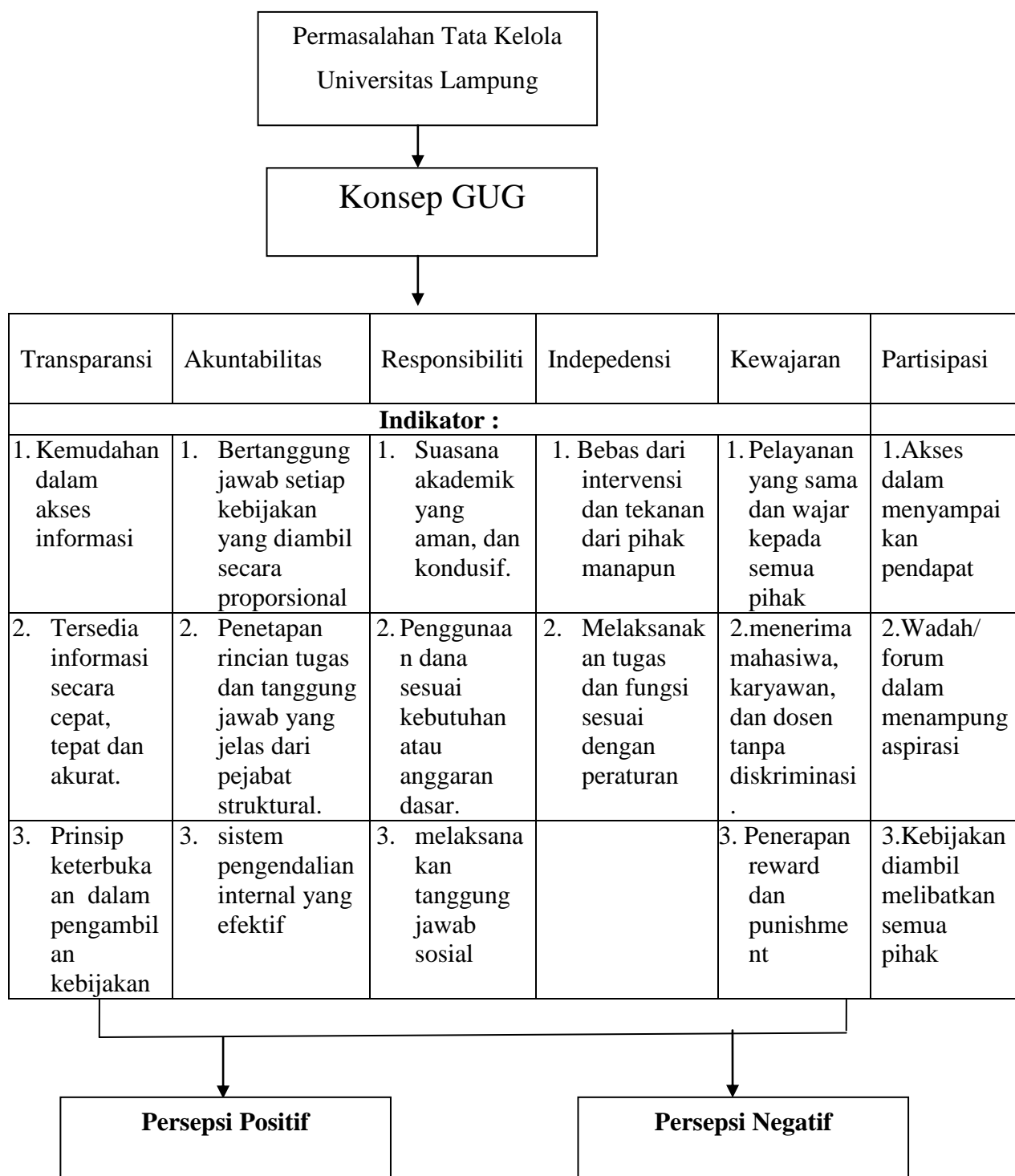
### E. Kerangka Pikir

Perguruan tinggi sebagai jenjang pendidikan tertinggi dalam sistem pendidikan formal dinegara kita, yang nantinya dituntut dapat menghasilkan tenaga-tenaga ahli profesional dibidangnya dan berdaya saing tinggi. Adapun konsep yang saat ini menjadi penting dalam penyelenggaraan perguruan tinggi adalah konsep *good university governance*. Konsep ini merupakan konsep turunan dari konsep *good corporate governance (GCG)* yang berawal dari tata pemerintahan yang baik yaitu *good governance*.

Pada dasarnya penerapan prinsip-prinsip *Good University Governance* ataupun *Good governance* dalam konteks yang dikaitkan dengan tata kelola perguruan tinggi yaitu agar setiap kebijakan atau pelayanan dapat dikontrol sehingga tidak keluar dari koridor yang ditentukan dan tidak melanggar hukum yang ditetapkan. Pengimplementasian dari setiap kebijakan yang dikeluarkan dan dapat tepat sasaran dan sesuai harapan dari semua pihak.

Prinsip tata kelola yang baik tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan dan kebijakan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan universitas yang baik yang tidak hanya melibatkan pimpinan semata. Penerapan GUG bukan hanya mencakup relasi pengelolaan universitas melainkan adanya relasi sinergis sejajar antara universitas, mahasiswa dan masyarakat sehingga terwujud pengelolaan universitas yang bersih responsif bertanggung jawab, serta kehidupan masyarakat yang baik.

Penelitian ini, memfokuskan pada pembahasan mengenai persepsi mahasiswa yang akan memberikan penafsiran dan tanggapan terhadap hal-hal yang berlaku di lingkungan Unila mengenai pelaksanaan tata kelola perguruan tinggi. Pelaksanaan tata kelola yang baik berdasarkan konsep GUG yang sesuai untuk diterapkan lingkungan Unila itu sendiri maka hendaknya berlandaskan dari prinsip-prinsip GUG yaitu: akuntabilitas, transparansi, responsibiliti, independensi, dan kewajaran. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir**



### **III. METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif deskriptif, karena penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini disebut metode penelitian kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.

Penelitian ini juga bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara terperinci mengenai persepsi mahasiswa terhadap tata kelola Unila dari perspektif GUG dan hanya menggunakan variabel tunggal. Menurut Pasolong (2013: 75) penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian, dimana didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.

Sedangkan menurut Siregar (2013: 7) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud penelitian deskriptif adalah penelitian untuk merumuskan sebuah gambaran tentang gejala, peristiwa, kejadian yang sedang terjadi saat sekarang secara faktual.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di lingkungan Universitas Lampung, pada tanggal 5 April s.d. 5 Mei 2016. Hal ini didasari karena dalam penelitian ini ditujukan untuk melihat persepsi mahasiswa terhadap tata kelola Universitas Lampung dengan menggunakan konsep GUG.

### **C. Definisi Konseptual**

Pada penelitian sosial, dibutuhkan suatu konseptual untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Menurut Bungin (2010: 108) Konsep merupakan generalisasi dari sekelompok fenomena yang sama. Menurut Silalahi (2012: 112) mengatakan bahwa konsep merupakan abstraksi tentang fenomena sosial yang dirumuskan melalui generalisasi dari sejumlah karakteristik, peristiwa, kejadian, atau keadaan fenomena sosial tertentu.

Definisi konseptual bermanfaat untuk membuat logika proses perumusan hipotesis. Diharapkan definisi konseptual ini dapat menyederhanakan seluruh

pemikiran dengan menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu sama lainnya. Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah :

1. Persepsi

Persepsi adalah proses seseorang untuk melihat dan memahami fenomena yang dialami disekitarnya yang diterima alat indera, kemudian diolah di dalam otak, melalui pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki sehingga mampu memberikan kesan positif maupun negatif.

2. Mahasiswa

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu di sebuah perguruan tinggi yang memiliki intelektual lebih dan memiliki jiwa pembaharuan serta pemikiran kritis terhadap fenomena-fenomena sosial yang ada untuk disikapi.

3. Tata kelola universitas

Sebagai suatu tatanan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana tata kelola universitas dalam menjalankan suatu tata kelola, dimana untuk bertujuan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari suatu tata kelola itu sendiri sebagai bentuk perwujudan tata kelola yang baik (*Good University Governance*).

#### **D. Definisi Operasional**

Silalahi (2013: 120) mengatakan bahwa Definisi operasional merupakan definisi yang menyatakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan-rujukan empiris. Menurut Purwanto dan Dyah

(2011:18) mengatakan Definisi operasional adalah suatu konsep yang digambarkan dalam definisi konsep saja tidak akan dapat diobservasikan atau diukur gejalanya dilapangan. Untuk dapat diukur maka suatu konsep harus didefinisikan secara operasional.

Sedangkan menurut Pasolong (2013: 88) Definisi operasional menjabarkan pengertian suatu konsep abstrak dengan menurunkan pada tingkat yang lebih konkrit agar konsep tersebut dapat diukur secara empiris. Namun dalam mendapatkan pemahaman yang mendalam dan konkrit terhadap konsep-konsep yang abstrak (*constructs*) yang dipergunakan maka perlu dijelaskan dalam bentuk definisi operasional.

Berdasarkan keterangan di atas, maka pada dasarnya definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur dan sebagai acuan dalam menafsirkan permasalahan yang diteliti. Berikut ini adalah uraian mengenai definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

**Tabel.6 Indikator Operasional Variabel Tata kelola universitas (*Good University Governance*)**

<b>Indikator</b>	<b>Sub Indikator</b>	<b>Item</b>
<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1. Transparansi	1. Kemudahan dalam akses informasi	1
	2. Universitas menyediakan informasi secara tepat , jelas dan akurat sesuai dengan visi dan misi universitas.	2
	3. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama media massa dan lembaga non pemerintah.	3-4
	4. Penyampaian setiap kebijakan yang diambil oleh Unila.	5
	5. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan kegiatan secara terbuka, cepat dan tepat kepada mahasiswa.	6
2. Akuntabilitas	1. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi mahasiswa	7
	2. Mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan yang diambil secara proporsional	8
	3. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil lingkup audit internal.	9-11
3. Responsibiliti	1. Membangun suasana akademik yang kondusif dalam mendukung proses pembelajaran.	12-13
	2. Memanfaatkan dana dengan kehati-hatian sesuai dengan tujuan pemberi dana.	14-15
	3. Mempunyai uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas dari setiap pejabat struktural.	16
	4. Melaksanakan tanggung jawab sosial.	17
4. Indepedensi	1. Pengelola perguruan tinggi dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya harus terhindar dari interpersi dan dominasi dari pihak manapun sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.	18-19
	2. Setiap organ universitas melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar dan	20-21

	peraturan perundangan , tidak saling mendominasi atau saling melempar tanggung jawab satu sama lain.	
5. Kewajaran	1. Universitas memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada universitas.	22-24
	2. Universitas memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, mahasiswa, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa adanya diskriminasi.	25
	3. Penerapan <i>reward dan Punishment</i> kesemua pihak tanpa adanya diskriminasi	26
6. Partisipasi	1. Terdapat akses bagi semua pihak dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi.	27-28
	2. Adanya forum untuk menampung aspirasi masyarakat yang represntatif, jelas dan terbuka.	29
	3. Pengambilan keputusan melibatkan semua pihak.	30

Sumber: Diolah oleh peneliti

## E. Populasi Dan Sample Penelitian

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012: 80), populasi diartikan sebagai generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang memunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pasolong (2013: 100) Populasi adalah keseluruhan atau univers yang ciri-cirinya atau karakteristik-karakteristiknya dapat diamati untuk ditarik menjadi suatu sampel dalam penelitian.

Sedangkan menurut Siregar (2013: 30), mengatakan populasi penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, maka populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Unila angkatan 2013 dan 2014 yang masih tercatat sebagai mahasiswa aktif dengan jumlah 11.798 mahasiswa. Penelitian ini tidak menggunakan populasi mahasiswa pasca sarjana/magister.

## 2. Sampel

Menurut Siregar (2013: 30) Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi. Pasolong (2013: 103) Sampel adalah sebagian dari kuantitas populasi yang mencerminkan dari keseluruhan populasi tersebut.

Penelitian ini dalam penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiono (2012: 218) teknik ini menghendaki cara pengambilan sampel yang berdasarkan pada kriteria dan ciri-ciri tertentu dari populasi. Menurut Bungin (2010: 223) *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Dalam penelitian ini penulis dalam menentukan sampel di dasarkan atas kriteria sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif Universitas Lampung;
- b. Mahasiswa angkatan 2013 dan 2014;
- c. Mahasiswa program Sarjana dan Diploma;
- d. Paham UKT baik mahasiswa yang melakukan banding UKT atau tidak;

Sampel dalam penelitian ini yang akan diambil adalah mahasiswa Unila angkatan 2013 dan 2014. Adapun untuk menentukan ukuran sampel menggunakan rumus Frank Lynch (1974: 18) dengan glagat 10% sebagai berikut:

$$n = \frac{Nz^2 \cdot P (1-P)}{Nd^2 + Z^2 \cdot P (1-P)}$$

Keterangan:

- n : Banyaknya sampel  
 N : Jumlah Populasi  
 d : Nilai normal dari variabel (1,96) tingkat kepercayaan 90%  
 P : Harga patokan (0,50)  
 d : Sampling error (0,10)

Sampel dalam penelitian ini yaitu :

$$n = \frac{Nz^2 \cdot P (1-P)}{Nd^2 + Z^2 \cdot P (1-P)}$$

$$n = \frac{11798(1,96)^2 \cdot 0,50 (1- 0,50)}{11798(0,10)^2 + (1,96)^2 \cdot 0,50 (1- 0,50)}$$

$$n = \frac{11798 (3,84) \cdot 0,25}{11798 (0,01) + 3,84 \cdot 0,25}$$

$$n = \frac{11328,08}{118,94} = 95,22 = 95 \text{ Responden}$$



maka sample pada penelitian ini berjumlah 95 responden mahasiswa.

Jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah 95 responden, yang terbagi atas delapan sub sampel Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Pertanian (FP), Fakultas Teknik (FT), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan Fakultas Kedokteran(FK).

Selanjutnya menentukan alokasi sampel yang berimbang dengan besarnya populasi maka diperlukan rumus *proportional sampling* yaitu;

$$N_h = \frac{N_i \times n}{N}$$

Keterangan :

$N_h$  = Banyaknya sampel kelompok tertentu

$n$  = Jumlah sampel yang mewakili populasi

$N_i$  = Banyaknya sub populasi dari setiap kelompok (fakultas)

$N$  = Banyaknya populasi seluruhnya

Berdasarkan penentuan sampel dengan rumus *proportional sampling* maka dapat di tentukan besaran sampel yang diperoleh yaitu:

**Tabel 7. Jumlah Sampel Responden Berdasarkan Angkatan**

Sub Sampel Fakultas	N <sub>i</sub>		Responden	
	Angkatan		Angkatan	
	2013	2014	2013	2014
FEB (N <sub>1</sub> )	956	954	8	8
FH (N <sub>2</sub> )	539	597	4	5
FKIP (N <sub>3</sub> )	1511	1617	12	13
FP (N <sub>4</sub> )	678	755	5	6
FT (N <sub>5</sub> )	623	692	5	6
FISIP (N <sub>6</sub> )	682	752	5	6
MIPA (N <sub>7</sub> )	488	547	4	4
FK (N <sub>8</sub> )	185	222	2	2
Jumlah	5662	6136	45	50

Sumber: BAK Unila tahun 2013-2014 (Data diolah sendiri oleh peneliti)

**Tabel 8. Jumlah Sampel Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Sub Sampel Fakultas	N <sub>i</sub>		Responden					
			Perangkatan		Jenis Kelamin			
	2013		2014		2013		2014	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
FEB (N <sub>1</sub> )	521	435	489	465	4	4	4	4
FH (N <sub>2</sub> )	348	191	352	241	2	2	3	2
FKIP (N <sub>3</sub> )	657	854	726	891	5	7	6	7
FP (N <sub>4</sub> )	323	355	354	410	2	3	3	3
FT (N <sub>5</sub> )	428	195	424	268	3	2	4	2
FISIP (N <sub>6</sub> )	365	317	331	421	3	2	3	3
MIPA (N <sub>7</sub> )	231	257	252	295	2	2	2	2
FK (N <sub>8</sub> )	42	143	55	167	1	1	1	1
Jumlah	2915	2747	2974	3158	22	23	26	24

Sumber: BAK Unila Tahun 2013-2014(Data diolah sendiri oleh peneliti)

Pengambilan sampel dari setiap strata dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dimana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu untuk mempermudah peneliti dalam hal efisiensi waktu, biaya dan tenaga mengingat besarnya sampel. Mahasiswa yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa program Sarjana dan

Diploma terdiri dari angkatan 2013 dan 2014, mengingat angkatan 2015 yang masih tergolong mahasiswa baru dan belum sepenuhnya memahami tentang tata kelola di Unila, dalam penelitian ini juga tidak mengambil sampel mahasiswa pasca sarjana melihat tidak semua jurusan memiliki program magister dan jumlah mahasiswa terbatas belum mampu mewakili secara keseluruhan setiap jurusan serta masa studi lebih cepat dan waktu kuliah yang berbeda sehingga tidak memungkinkan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

## **F. Jenis dan Sumber Data**

Berdasarkan keperluan penelitian, diperlukan data yang akurat dan sah. Menurut Bungin (2010: 133) data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini :

### **1. Data Primer**

Menurut Bungin (2010: 128) Data yang didapat dari pihak pertama langsung atau orang yang berkaitan langsung dari sumber pertama dilapangan. Pasolong (2013: 70) juga mengatakan Data primer data yg diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Pada penelitian ini yang menjadi data primer yaitu kuesioner yang disebarkan secara langsung kepada seluruh responden yaitu mahasiswa di Universitas Lampung.

## **2. Data Sekunder**

Menurut Pasolong (2013: 70) Data sekunder semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, jadi data yang dikumpulkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Bungin (2010: 128) data sekunder adalah data pendukung yang di peroleh dari sumber kedua sesudah sumber data primer.

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, penulis menyimpulkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, jadi sumber data sekundernya adalah dokumentasi, dan buku-buku penunjang berkaitan dengan tata kelola universitas.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Kuesioner**

Sugiyono (2012: 142), Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos, atau internet. Menurut Pasolong (2013: 141) Kuesioner adalah suatu pengumpulan data melalui daftar pertanyaan yang diisi oleh responden itu sendiri. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan peneliti adalah :

- a. Menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan topik yang diteliti oleh peneliti.
- b. Membagi kuesioner kepada responden (mahasiswa Universitas Lampung sebanyak 95 responden mahasiswa dari delapan fakultas).
- c. Setelah mendapat semua data yang diperlukan, maka jawaban pada kuesioner akan diolah dan dianalisis.

## **2. Obsevasi**

Siregar (2013: 19) Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga dapat digambarkan secara jelas tentang kondisi objek penelitian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa Observasi adalah merupakan sebuah metode yang dilakukan dengan menggunakan sebuah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi dilakukan di Universitas Lampung, metode ini digunakan untuk mengetahui lebih jelas tentang gambaran umum tentang kondisi Universitas Lampung, dan memvalidasi informasi yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian.

## **3. Wawancara**

Pasalong (2013: 137), wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Menurut Siregar (2013: 18),

wawancara adalah proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dengan bertatap muka antara pewawancara dengan respondendengan menggunakan panduan wawancara.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada responden untuk dijawab guna memperoleh informasi yang lebih mendalam. Penelitian ini melakukan wawancara dengan saudara Ahmad Nurhidayat selaku Presiden mahasiswa Unila, saudara Juwanda selaku Gubernur Fisip, saudara Kurnia Mahardika selaku Pimpinan Umum UKM Teknokra, dan saudara Afiza Rinaldo selaku Kabid Hubungan Luar UKM KOIN Unila.

#### **4. Dokumentasi**

Arikunto (2013: 57), menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai suatu hal atau variabel melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dokumentasi adalah pengambilan data mengenai hal-hal atau variabel melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

## H. Teknik Pengolahan Data

Sebelum data dianalisis maka data yang didapat dilapangan harus diolah terlebih dahulu. Teknik pengolahan data merupakan tahapan dimana data dipersiapkan, diklasifikasi dan diformat menurut aturan tertentu untuk keperluan proses berikutnya yaitu analisis data. Data yang di dapat akan diolah melalui beberapa proses yaitu:

### 1. *Editing*

Tahapan *editing* adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data. Tujuan dari *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.

### 2. *Koding*

yang dimaksud dengan *koding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden kedalam katagori-katagori. Dalam tahap ini adalah kegiatan mengorganisasi data ke dalam kategori-kategori tertentu agar mudah dianalisa.

### 3. *Tabulasi*

Pekerjaan tabulasi adalah pekerjaan membuat tabel. Jawaban-jawaban yang sudah diberi kode katagori jawaban kemudian dimasukkan kedalam tabel. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan jawaban-jawaban responden yang serupa. Pada penelitian ini data-data yang diperoleh dari

lapangan kemudian disusun kedalam bentuk tabel, sehingga pembaca dapat melihat dan memahaminya dengan mudah;

#### **4. Intepretasi Data**

Tahap ini adalah tahap memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari responden dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada.

#### **I. Skala Pengukuran**

Metode pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala likert. Menurut Sugiono (2002: 74) Skala likert digunakan dalam mengatur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Pasalong (2013: 153), dalam menyusun pertanyaan dan pernyataan penelitian Skala Likert, dengan skala likert satu sampai dengan lima, dan jumlah item dibuat sekitar 20 sampai 25 pertanyaan atau pernyataan untuk mengukur variabel sehingga reliabilitasnya tinggi, dan item dalam bentuk positif dan negatif dalam proporsi yang seimbang. Untuk keperluan penelitian kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor 5 untuk sangat baik, skor 4 untuk baik, skor 3 untuk ragu-ragu, skor 2 untuk tidak baik, dan skor 1 untuk sangat tidak baik.

Untuk mencegah keragu-raguan responden dalam penilaian, maka penelitian ini hanya menggunakan 4 penilaian dalam skala likert, dengan penentuan skor yang dapat dilakukan sebagai berikut:



1. Jawaban A diberi skor 4 (Empat) : (Sangat Setuju) ;
2. Jawaban B diberi skor 3 (Tiga) : (Setuju);
3. Jawaban D diberi skor 2 (Dua) : (Tidak Setuju) ;
4. Jawaban E dibersi skor 1 (Satu) : (Sangat Tidak Setuju)

## **J. Teknik Analisis Data**

Silalahi (2013: 331), Analisis data adalah proses penyederhanaan dan penyajian data dengan mengelompokan dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan di intrepretasikan. Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti atau untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif. Pasalong (2013: 189), analisis deskriptif adalah analisis yang banyak digunakan untuk menguji satu variabel atau variable mandiri. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, dengan penggunaan tabel tunggal, yaitu metode yang dilakukan dengan memasukan data dari kuesioner ke dalam kerangka tabel untuk menghitung frekuensi dan membuat presentase sebagai uraian mengenai hasil akhir penelitian. Serta analisa deskriptif hasil wawancara terbuka.

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dengan penggunaan tabel tunggal, untuk menggambarkan jawaban responden terhadap Persepsi Mahasiswa terhadap Tata Kelola Unila. Setelah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan menentukan skor jawaban,

Analisis dihitung berdasarkan hasil dari kuesioner yang berasal dari jawaban responden diberi skor atau nilai berdasarkan skala likert yaitu:

1. Sangat Setuju (SB) = 4
2. Setuju (B) = 3
3. Tidak Setuju (TB) = 2
4. Sangat Tidak Setuju (STB) = 1

Selanjutnya, untuk mengetahui presentase dari jawaban responden menggunakan menggunakan rumus presentase berikut ini:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

*Sumber : Purwanto, dan Dyah Ratih (2011: 111)*

Keterangan:

P = Persentase

F = Frekuensi suatu kasus

N = Jumlah Populasi

Untuk mengkategorikan persepsi mahasiswa terhadap tata kelola Unila (GUG) ke dalam persepsi positif dan negatif, digunakan rumus interval (Arikunto (2010: 185) sebagai berikut:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

K

Keterangan :

- I = Interval  
 NT = Nilai Total Tinggi  
 NR = Nilai Total Rendah  
 K = Kategori Jawaban

Pemetaan kategori Persepsi dari mahasiswa Unila dilakukan dengan dasar banyaknya butir pertanyaan yang diajukan yaitu 30 pertanyaan dan teknik penentuan skor yang digunakan, sehingga diperoleh perhitungan interval sebagai berikut:

1. Nilai Tertinggi (NT) adalah  $4(\text{skor tertinggi}) \times 95(\text{banyaknya responden}) = 380$
2. Nilai Terendah (NR) adalah  $1(\text{skor terendah}) \times 95(\text{banyaknya responden}) = 95$
3. Kategori (K) yang dicari adalah 2 (positif dan negatif)

Perhitungan nilai intervalnya adalah sebagai berikut:

$$I = \frac{NT-NR}{K} = \frac{380-95}{2} = \frac{285}{2} = 142,5$$

Berdasarkan nilai interval sebesar 142,5 maka kategori persepsi mahasiswa Unila adalah sebagai berikut:

1. Positif, jika total pertanyaan responden berada di interval 237,5-380
2. Negatif, jika total pertanyaan responden berada di interval 94-236,5

Selanjutnya, kategori persepsi mahasiswa terhadap tata kelola Unila secara keseluruhan berdasarkan kedua komponen dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 9. Kesimpulan Kategori Persepsi Mahasiswa Terhadap Tata Kelola Universitas Lampung (Good University Governance)**

<b>Kategori Pertanyaan (1)</b>	<b>Rentang Interval (2)</b>	<b>Frekuensi (3)</b>	<b>Presentase (4)</b>
Positif	75-120	20	66,67
Negatif	29-74	10	33,33
	Jumlah	30	100

S

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2016

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 30 pertanyaan, terdapat 20 (66,66%) pertanyaan, yang dinilai responden positif dalam pelaksanaan tata kelola Unila; terdapat 10 (33,33%) pertanyaan, yang dinilai responden negatif dalam pelaksanaan tata kelola Unila. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa Persepsi mahasiswa terhadap tata kelola Unila (GUG) termasuk dalam kategori persepsi yang positif.

## **K. Uji Validitas dan Reliabilitas**

### **1. Pengertian Uji Validitas dan Reliabilitas**

Sugiyono (2012: 121), mengatakan bahwa hasil penelitian yang valid apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan menurut Pasaolong (2013: 174), validitas adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu

mengukur apa yang ingin diukur. Jadi, alat ukur yang valid adalah alat ukur yang digunakan untuk mendapat data valid.

Sugiyono (2012: 121), menyatakan bahwa hasil penelitian yang reliabel, apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Sedangkan Pasalong (2013: 174) Reliabilitas merupakan istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Jadi, reliabilitas adalah tingkat keterandalan atau konsistensi suatu alat ukur menghasilkan yang sama bila dilakukan secara berulang-ulang.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dapat melakukan fungsi pengukurannya. Sedangkan realibilitas adalah sejauh mana konsistensi suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Jadi, instrumen yang valid dan reliabel merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang yang valid dan reliabel.

## **2. Teknik Uji Validitas dan Reliabilitas**

Priyatno (2012: 120), uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui keajegan atau konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner (maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali).

Metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan (seperti skala Likert 1-5) adalah Cronbach's Alpha.

Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas di mana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja. Menggunakan batasan 0,6, dapat ditentukan apakah instrumen reliabel atau tidak. Menurut Sekaran (Priyatno, 2012: 120), reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 adalah dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik.

Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan oleh peneliti menggunakan SPSS, dapat diketahui bahwa signifikansi dari instrumen yaitu  $< 0,05$ , hal ini menunjukkan bahwa item valid. Sedangkan, uji reliabilitas yang dilakukan peneliti dengan menggunakan batasan 0,6, menghasilkan reliabilitas 0,7, hal ini menunjukkan bahwa reliabilitas dari penelitian ini adalah dapat diterima. Derajat kepercayaan dalam penelitian ini adalah 95 %.

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Sejarah Universitas Lampung**

Berdasarkan buku Panduan Umum Unila (2012), diperoleh informasi bahwa usaha mendirikan perguruan tinggi di daerah Karesidenan Lampung timbul dari dua panitia yang lahir pada tahun 1959, yaitu Panitia Pendirian dan Perluasan Sekolah Lanjutan (P3SL) di Tanjungkarang, yang diketuai Zainal Abidin Pagar Alam dan sekretarisnya Tjan Djit Soe; dan Panitia Persiapan Pembentukan Yayasan Perguruan Tinggi Lampung (P3YPTL) yang dibentuk di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 1959 dengan ketua Nadirsjah Zaini, M.A. dan sekretarisnya Hilman Hadikusuma. Tanggal 19 Januari 1960, P3SL mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat Lampung untuk mempersiapkan berdirinya suatu perguruan tinggi.

Tanggal 19 Juli 1960, Sekretariat Fakultas Ekonomi Hukum Sosial (FEHS) Lampung dibuka di aula gedung sekolah bekas Hak Haw di jalan Hasanuddin No.34 Telukbetung oleh 3 mahasiswa yang mewakili P3SLF, yaitu Hilman Hadikusuma, Alhusniduki Hamim, Abdoel Moeis Radja Hukum. Kemudian tanggal 7 September 1960 panitia P3SLF dan P3YPTL dilebur menjadi satu yayasan dengan nama Yayasan Pembina

Perguruan Tinggi Lampung (YPPLT) dengan akte wakil Notaris M.M Effendi Nomor 24 tanggal 23 November 1960, yang bertugas membina fakultas dan mengusahaakan perubahan status menjadi negeri.

Berdasarkan surat keputusan presiden Universitas Sriwijaya (dr. M.Isa) Nomor D-40-7-61 tanggal 14 februari 1961, terhitung tanggal 1 februari 1961 ditetapkan jurusan FEHS Lampung menjadi cabang fakultas ekonomi Unsri dan Jurusan Hukum FEHS menjadi cabang fakultas hukum Unsri. Hi. Zainal Abidin Pagar Alam ditunjuk sebagai anggota kurator Unsri di wilayah Lampung atas dasar Surat Keputusan Presiden Unsri Nomor UP/031/C-1/1961. Mr. Hoesin Effendi mendapat kepercayaan untuk memimpin fakultas ekonomi dan Drs. Moersalin di beri kepercayaan memimpin fakultas hukum.

Berdasarkan surat keputusan menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 195 tahun 1965 menyatakan bahwa sejak tanggal 23 September 1965 berdiri Universitas Lampung (Unila). Kusno Danupoyo yang pada saat itu sebagai Gubernur/PDH Provinsi Lampung diangkat sebagai pejabat Ketua Presidium Unila pada tahun 1965 digantikan Gubernur terpilih Hi. Zainal Abidin Pagar Alam, kemudian dikukuhkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung.

Awal berdiri Unila berada di 3 lokasi , yaitu jalan Hasanuddin Nomor 34; kompleks jalan Jenderal Suprpto Nomor 61 Tanjungkarang; kompleks jalan Sorong Cimeng Telukbetung. Sejak tahun 1973/1974 telah dibangun



kampus Unila di Gedongmeneng dan saat ini Unila terdiri atas delapan fakultas yaitu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Matematika dan pengetahuan Ilmu Alam dan Fakultas Kedokteran. Semua fakultas sudah berada didalam lingkungan kampus Unila.

Berkisar tahun 1960 sampai 1965, Unila dipimpin oleh seorang koordinator sejak tanggal 25 Desember 1965 sampai dengan 28 Mei 1973, Unila dipimpin oleh presidium yang diketua oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Lampung. Sejak Mei 1973 sampai sekarang, Unila di pimpin oleh seorang Rektor secara berurut sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Ir. Hi. Sitanala Arsyad (1973-1981)
2. Prof. Dr. R. Margono Slamet (1981-1990)
3. Hi. Alhusniduki Hamim S.E. M.Sc. (1990-1998)
4. Prof. Dr. Ir. Muhajir Utomo, M.Sc. (1998-2007)
5. Prof. Dr. Ir. Sugeng P.Haryanto, M.S. (2007-2015)
6. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. (2015-2019)

## **B. Filosofi Universitas Lampung**

Untuk melandasi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, telah dirumuskan filosofi Unila, yang memberikan dasar pertimbangan dalam memilih alternatif, gerak, dan langkah yang berdasarkan kepada keyakinan dasar yang telah dicanangkan. Filosofi Unila sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kepuasan pelanggan (*Customer*)

Unila sebagai penyelenggaraan jasa pendidikan meletakkan mahasiswa sebagai *customer* utama. Mahasiswa menjadi orientasi utama pelayanan Unila dalam mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki untuk penyelenggaraan pendidikan diatas segala pertimbangan lainnya. Masyarakat umum dan masyarakat ilmiah pada khususnya merupakan pelanggan lain Unila, melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, hasilnya diharapkan dapat bermanfaat dan memuaskan masyarakat.

2. Bertumpu pada organisasi dan manajemen yang profesional

Dalam rangka penerapan paradigma baru pendidikan tinggi, organisasi Unila akan mengembangkan dan disempurnakan terus-menerus menuju terwujudnya suatu organisasi dengan model manajemen mutakhir yang profesional, yang dilengkapi dengan piranti lunak berupa sumber daya manusia berkualitas dan piranti keras yang bermanfaat teknologi canggih, sehingga manajemen organisasi Unila berciri efisien, *auditable*, dan *accountable* dalam rangka menuju upaya peningkatan ketua lulusan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Implementasi sistem penjaminan mutu Unila dengan lingkup (manual mutu Unila, 2007) meliputi:

- a. Pengendalian dokumen;
- b. Pengendalian data;
- c. Pengendalian tinjauan manajemen (*Review Management*);

- d. Pengendalian sasaran mutu;
  - e. Pelaksanakan audit internal;
  - f. Pemantauan kepuasan (Stakeholder);
3. Berupa peningkatan kualitas secara berkelanjutan (Continuous Quality Improvement)

Peningkatan kualitas pelayanan di bidang jasa pendidikan agar dapat menghasilkan lulusan Unila yang:

- a. Intelektual, berjiwa pancasila dan berintegritas tinggi;
  - b. Memiliki kompetensi memadai di bidangnya masing-masing;
  - c. Berkemampuan belajar mandiri secara berkelanjutan agar siap menjadi profesional dalam memasuki dunia kerja, serta berkompetisi dalam memenuhi tuntutan perubahan zaman;
4. Bekerja berdasarkan perencanaan *Top Down – Bottom Up*

Unila menerapkan sistem perencanaan tertulis yang dikembangkan dengan memadukan aspirasi dari jurusan/fakultas (*bottom up*) dengan arahan kebijakan (*top down*) dari pusat (Dirjen Dikti) yang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai efisiensi setinggi-tingginya dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas lulusan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

5. Lingkungan kerja yang kondusif

Unila telah tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang besar dan maju menjadi lebih baik lagi. Pertumbuhan dan perkembangan Unila yang diinginkan adalah yang menguntungkan, teratur, dan

terkendali. Dalam kaitan ini semua unsur dalam organisasi Unila harus menjunjung tinggi nilai luhur yang terkandung dalam organisasi, yaitu:

- a. Kesadaran tinggi akan pentingnya kualitas;
- b. Setiap orang bertanggungjawab terhadap kualitas;
- c. Perbaikan harus dilakukan secara terus menerus;
- d. Etos kerja keras penuh pengertian;
- e. Bekerja secara efektif dan efisien;
- f. Bekerja dalam sistem kerja yang cerdas;
- g. Iklim kerja harmonis;

### **C. Visi Misi Universitas Lampung**

#### **1. Visi Unila**

Visi yang ditetapkan berperan sebagai aspirasi, penuntun, sumber inspirasi dan motivasi bagi bagi civitas akademika, karyawan dan pemangku kepentingan demi Unila lebih maju, maka visi sebagai visualisasi bentuk paripurna unila yang akan dicapai tahun 2015, dirumuskan yaitu: “Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia”. Visi Unila tahun 2025 mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan tinggi sebagai berikut:

- a. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
  1. Pemberian bantuan pembiayaan untuk kelompok masyarakat yang miskin tetapi potensial untuk belajar di Unila;
  2. Membangun kemitraan Unila dalam pemangku kepentingan nasional dan internasional;

3. Pengembangan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan multimedia;
- b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing
1. Peningkatan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  2. Penerapan otonomi keilmuan untuk mendorong fakultas melaksanakan tugasnya sebagai pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi;
  3. Pengembangan Kurikulum dan pembelajaran efektif dalam kelompok mata kuliah: iman dan taqwa serta akhlak mulia, ipteks, estetika serta kepribadian;
  4. Pemberdayaan masyarakat berbasis keunggulan dan kearifan lokal dengan penyediaan tenaga terampil untuk industri lokal, nasional dan global serta pengembangan kewirausahaan;
- c. Penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik
- a. Mempersiapkan mengembangkan Unila sebagai perguruan tinggi yang otonom;
  - b. Mengembangkan satuan pengendalian internal untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
  - c. Membangun pencitraan yang positif Unila untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat;

- d. Peningkatan kapasitas pengelolaan yang ditunjang dengan penerapan teknologi informasi dan komunikasi;

## 2. Misi Unila

Misi Unila merupakan perwujudan dari fungsi yang berlandaskan pada peranan dan tugas pokok perguruan tinggi, dalam hal ini Unila mempunyai misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas;
- b. Mewujudkan budaya akademik yang kondusif, dinamis dan bermoral;
- c. Mewujudkan tata kelola organisasi unila yang baik (GUG);
- d. Mewujudkan aksesibilitas dan equitas pendidikan tinggi;
- e. Menjadi agen perubahan dan menjaga kebenaran dan keadilan bagi kepentingan masyarakat;
- f. Mewujudkan kerja sama dengan berbagai pihak antara lain pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga non pemerintah, dalam dan luar negeri, yang saling memberikan manfaat secara berkelanjutan;

### **D. Organisasi Universitas Lampung**

Struktur organisasi Unila diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Struktur organisasi Unila terdirai atas:

### 1. Dewan Penyantun

Dewan penyantun merupakan forum yang menjembatani masyarakat dengan Unila. Keanggotaan Dewan Penyantun terdiri dari:

- a. Anggota kehormatan terdiri dari unsur Muspida Tingkat I Propinsi Lampung, Bupati, Walikota, dan pejabat terkemuka lainnya;
- b. Anggota biasa terdiri dari tokoh masyarakat yang menaruh perhatian kepada pendidikan, pembangunan, pengembangan Unila, dan alumni Unila yang tidak bertugas sebagai dosen di Unila;

### 2. Senat Universitas Lampung

Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Lampung. Senat Unila diketuai oleh Rektor yang didampingi oleh seorang sekretaris dan dalam pelaksanaan tugasnya senat dibantu oleh beberapa komisi yang dibentuk. Keanggotaan senat terdiri dari: a. Rektor; b. Para Wakil Rektor; c. Para Dekan; d. Para Guru Besar termasuk Guru Besar Luar Biasa; e. Para Dosen wakil fakultas (2 orang tiap fakultas);

### 3. Rektor

Rektor Unila merupakan kepanjangan tangan dari Menteri Pendidikan di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya sebagai pimpinan Unila, yaitu:

- a. Memimpin Universitas seperti digariskan oleh mendiknas dan membina sivitas akademika agar berdaya guna dan berhasil guna;

- b. Menentukan kebijakan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Unila yang sesuai dengan kebijaksanaan umum pemerintah (Mendiknas dan Dirjen Dikti) serta berdasarkan keputusan Senat Unila ;
- c. Membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi, badan swasta, dan masyarakat untuk memecahkan masalah yang timbul dalam bidang yang menyangkut tanggungjawab Rektor;

Dalam melaksanakan tugasnya Rektor dibantu oleh empat orang wakil rektor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor yaitu:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik (Wakil Rektor I/WR I)

Wakil rektor I bertugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan dan mengembangkan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, juga dibidang administrasi perencanaan sistem informasi dan kerjasama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor Unila;

2. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum (Wakil Rektor II/WR II)

Wakil Rektor II bertugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan dan mengembangkan bidang administrasi umum dan keuangan, serta mengusahakan pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan sarana serta prasarana yang dimiliki oleh Unila dan mengatur manfaatnya;



3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Wakil Rektor III/WR III)

Wakil Rektor II bertugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan dan mengembangkan bidang kemahasiswaan, termasuk pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, olahraga serta hubungan dengan alumni;

4. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem informasi dan Kerjasama (Wakil Rektor IV/WR IV)

Wakil Rektor IV bertugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan dan mengembangkan bidang perencanaan, sistem informasi, dan kerjasama antara Unila dengan pihak lain, baik di dalam negeri dan di luar negeri;

#### **E. Gambaran Umum Unila**

Kampus merupakan laboratorium akademik sekaligus pusat keilmuan masyarakat, dengan demikian kampus harus mampu menjaga idealisme dalam ranah keilmuan. Konsep tersebut akan menjadi dasar filosofis perguruan tinggi yang kemudian di implementasikan melalui tri dharma perguruan tinggi. Saat ini, Universitas Lampung sedang fokus memperbaiki sistem internal untuk menuju *top ten university* pada tahun 2025. Mimpi itu akan segera terwujud dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun lagi. Perbaikan selalu dilakukan untuk mencapai *top ten* mulai dari infrastruktur, kualitas pendidikan, sampai dengan pelayanan.

Akreditasi Unila saat ini adalah B, sedangkan Unila memiliki misi mencapai top ten university pada tahun 2015, untuk menyanggah status top ten university Unila harus mencapai akreditasi A. Itu artinya Unila harus bekerja keras untuk meningkatkan mutu pendidikannya, karena mutu adalah kekuatan penting yang dapat membuahkan keberhasilan baik di dalam organisasi dan pertumbuhan lembaga, hal ini juga erat kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan mutu pendidikan. Suatu pendidikan bermutu tergantung pada tujuan yang akan dilakukan dalam pendidikan.

Mengingat salah satu tujuan Unila adalah mencapai *top ten university*, dan melihat fakta kondisi Unila yang seperti sekarang maka sangat perlu kerja keras seluruh pihak kampus untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan di Unila. Seperti yang kita tahu, masih banyak jurusan dan prodi di Unila yang akreditasinya belum A. Mutu pendidikan juga akan meningkat apabila mutu tenaga pengajarnya serta prestasi juga mengalami peningkatan. Mulai dari penambahan jumlah profesor di Unila, penerbitan jurnal-jurnal ilmiah dan juga tata kelola universitas yang dikelola dengan baik.

Sejumlah sumber menunjukkan bahwa institusi pendidikan tinggi di negara maju telah mengembangkan program penjaminan mutu untuk meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mereka lakukan. Suatu sistem manajemen mutu kemudian diperkenalkan untuk menjamin kualitas

program, dan akhirnya suatu sistem audit eksternal juga diterapkan untuk mengevaluasi/meng-ases efektivitas dari sistem manajemen. Praksis terbaik implementasi sistem penjaminan mutu ini menuntut adanya komitmen yang kuat dari pimpinan perguruan tinggi.

Namun kenyataan menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki keterbatasan dalam hal kualitas/kualifikasi formal ketenagaan, keterbatasan sarana prasarana dan rendahnya kualitas lingkungan kerja, serta keterbatasan anggaran operasional, yang tentu saja tidak mendukung upaya untuk menjalankan tatakelola yang baik. Hal ini berakibat pada rendahnya kapasitas kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini menunjukkan bahwa di butuhkan suatu manajemen yang baik mengelola suatu universitas. Universitas lampung harus mampu meningkatkan standar penjaminan mutu dan mereformasi birokrasi sehingga pola kerja menjadi maksimal, teratur dan terkontrol hal ini dalam rangka mewujudkan *good university governance*. Manajemen yang baik akan membawa perubahan yang signifikan mulai dari akses pelayanan terhadap publik sampai sistem yang terkecil. Pelayanan yang buruk selalu akan menjadi sorotan publik setiap tahunnya hal ini akan terselesaikan melalui pola manajemen yang baik dengan standar yang sudah ditetapkan.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap tata kelola Unila melihat dari perseptif *good university governance*, maka dapat memberi kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *good university governance* di lingkungan Unila secara keseluruhan dinilai mahasiswa sudah baik atau positif. Untuk prinsip transparansi dengan persentase sebanyak 74,53%, akuntabilitas dengan persentase sebanyak 59,47%, independensi dengan persentase sebanyak 70,79% dan partisipasi dengan persentase sebanyak 60,52 mahasiswa menilai baik atau positif, sebagian indikator sudah dilaksanakan dan beberapa aspek belum baik pelaksanaannya.
2. Dalam indikator prinsip akuntabilitas yang masih dinilai negatif mahasiswa yaitu aspek pelayanan memuaskan karena pelayanan yang diberikan Unila belum memenuhi standar dan harapan mahasiswa. Dalam indikator prinsip partisipasi masih dinilai negatif mahasiswa

yaitu aspek ketersediaan sarana pengaduan bagi mahasiswa karena menilai sarana pengaduan yang ada sangat terbatas.

3. Untuk aspek tanggung jawab dengan persentase sebanyak 57,71% dan aspek kewajaran dengan persentase sebanyak 64,63% dinilai negatif dalam pelaksanaannya, sebagian indikator sudah dilaksanakan tetapi ada beberapa yang belum sesuai pelaksanaannya. Dalam indikator prinsip tanggung jawab masih dinilai negatif mahasiswa yaitu aspek membangun suasana akademik yang kondusif, sarana prasarana, pengelolaan dana keuangan. Hal ini dilihat dari ketersediaan sarana prasarana Unila yang terbatas tidak sebanding dengan pembayaran UKT yang sangat tinggi. Hal ini juga menunjukkan pengalokasian dana belum berdasarkan kebutuhan Universitas dan mahasiswa. Dan terbatasnya sarana prasarana yang ada membuat suasana akademik yang kurang baik serba keterbatasan.
4. Indikator prinsip kewajaran yang masih dinilai negatif mahasiswa yaitu aspek kesesuaian fasilitas dengan besarnya UKT, penentuan golongan UKT sudah sesuai dan *reward dan punishment*. Penggolongan UKT mahasiswa dinilai belum tepat sasaran karena hanya berdasarkan pada seleksi administrasi sehingga cenderung asal tembak. Mahasiswa juga menilai besarnya UKT yang bayar tidak sesuai dengan minimnya fasilitas yang diberikan. dan berkaitan *reward dan punishment* tanpa ada diskriminasi masih dinilai kurang baik penerapannya.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil simpulan tersebut, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Pelayanan hendaknya dijalankan kepada setiap mahasiswa, dosen, karyawan tanpa ada diskriminasi dan memenuhi standar dan harapan mahasiswa dalam pelaksanaannya. Pelayanan dengan seenuh hati, ramah tamah, cepat, nyaman serta semua akses dipermudah. Dan ketersediaan sarana pengaduan sangat di perlukan dalam rangka evaluasi kinerja dan pelayanan universitas
2. Besarnya SPI dan UKT mahasiswa hendaknya diimbangi dengan Sarana prasarana yang memadai, lengkap dan modern dalam menunjang proses belajar mahasiswa sehingga mahasiswa lebih nyaman dan lebih berprestasi dalam belajar. Universitas harus memberikan kewajiban yang menjadi hak mahasiswa.
3. Penentuan golongan UKT mahasiswa hendaknya tidak hanya dilakukan melalui seleksi administrasi, akan tetapi dapat dilakukan meninjau langsung kondisi ekonomi mahasiswa sehingga tidak terkesan asal tembak.
4. Penerapan *reward dan punishment* hendaknya dilaksanakan secara merata kepada semua pihak tanpa adanya diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Teks

- Alma, Buchari. 2008. *Manajemen Corporate dan Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan*. Bandung : AlfaBeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metodelogi Penelitian Format-format Kuantitatif Kualitatif*. Surabaya: Airlangga.
- Djanali, Supeno. 2005. *Tata Kelola*. Jakarta: Dikjen Dikti Depdiknas
- Ghafur, Hanief Saha. 2008. *Manajemen Penjamin Mutu Perguruan Tinggi di Indonesia*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility ( Transformasi Konsep Sustainability management dan Implementasi Di Indonesia*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Mar'at. 1981. *Sikap Manusia, Perubahan dan Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: AlfaBeta.
- Purwanto. Erwan Agus & Dyah. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif (untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2005. *Psikologi komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen P. & Timothy. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santosa, Panji. 2008. *Administrasi publik teori dan aplikasi good governance*. Bandung : Refika Aditama.
- Sarwono, Sarlito W. 2012. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Perss.

- Sedarmayanti. 2007. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dan good corporate governance (Tata kelola perusahaan yang baik)*. Bandung : Mandar Maju.
- , 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung : Refika Aditama.
- Silalahi, Uber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian, Effendi, 2006. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : Cetakan Kedelapanbelas, Edisi Revisi, Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tambak, Syahraini. 2013 . *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Thoha. Miftah. 2004. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2000. *Buku Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*.
- Wahyudi, Isa dan Busyra azheri. 2008. *Corporate Social Responsibility ( prinsip, Pengaturan dan Implementasi)*. Malang : Inspire dan SETARA Press.
- Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wijatno, Serian. 2009. *Pengelolaan Perguruan Tinggi Secara Efisien, Efektif dan Ekonomis Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan dan Mutu Lulusan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Yakub dan Vico hisbanarto. 2014. *Sistem Informasi Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Zarkasyi, Moh. Wahyudi. 2008. *Good Corporate Governance (Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya)*. Bandung : AlfaBeta.
- Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, BAPPENAS.



## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri.

## **Penelitian**

Kusuma, Anggara. 2011. Penerapan Prinsip-Prinsip Good University Governance (Studi di Lingkungan Universitas Lampung Tahun 2010). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Skripsi.

Dahro, Ahmad. 2013. Good University Governance dalam Perspektif *New Institutionalism* (Studi pada Akademi Kebidanan Adila Bandar Lampung). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Tesis.

Sebastian, Y. 2012. Prinsip-Prinsip Good University Governance Berbadan Hukum Yayasan di Indonesia. Universitas Kristen Catya Wacana.

Mardiastuti, Ambar. 2012. Persepsi Pasien Peserta Askes Terhadap Kualitas Pelayanan Perawatan (Studi di Rumah Sakit Umum kalianda Kabupaten Lampung Selatan). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Skripsi.

Komariyansyah. 2012. Persepsi Pasien Terhadap Balai Pengobatan Alternatif (Studi Kasus Pasien Pengobatan Alternatif di Bandar Lampung). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Skripsi.

Prisina, Rike. 2014. Fenomena Golongan Putih di Kalangan Mahasiswa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 (Studi Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan). Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Skripsi.

## Sumber Lain

[www. Unila.ac.id](http://www.Unila.ac.id).

[www. Bem.Unila.ac.id](http://www.Bem.Unila.ac.id).

[ww.dikti.go.id](http://ww.dikti.go.id)

[www.Bandarlampungkota.bps.go.id](http://www.Bandarlampungkota.bps.go.id).

[www.forlap.dikti.go.id](http://www.forlap.dikti.go.id)

Tabloid Teknokra Edisi Mingguan Nomor 145 November 2015.

Panduan Universitas Lampung, 2012.

Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003-2010: Mewujudkan Perguruan Tinggi Berkualitas. 2004, Departemen Pendidikan Nasional. (<http://www.dikti.go.id> ).

## Jurnal dan Internet

Muhi, Ali Hanapiah. *Membangun Good Governance pada Perguruan Tinggi Di Indonesia*.<http://alimuhi.staff.ipdn.ac.id/wpcontent/uploads/2011/04/MEMB.GOOD.GOV.PADA.PT.pdf>. di akses pada tanggal 24 Desember pukul 20.23 WIB.

Tamin, Rizal Z. *Governance Perguruan Tinggi*. Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Pendidikan Tinggi <http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/statuta/latih/2014/03GoodUniversityGovernance.pdf> di akses pada tanggal 27 Desember pukul 20. 55 WIB.

Sebastian, Y. *Prinsip-prinsip Good University Governance Berbadan Hukum Yayasan Di Indonesia*.[http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2646/2/T1\\_232008209\\_Full%20text.pdf](http://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2646/2/T1_232008209_Full%20text.pdf). Di akses pada tanggal 27 Desember pukul 21.03 WIB.

<http://bak.unila.ac.id/kondisi-jumlah-mahasiswa-unila/> di akses pada tanggal 27 Desember pukul 20.43 WIB.

<https://www.unila.ac.id/mengenal-bkt-biaya-kuliah-tunggal-dan-ukt-uang-kuliah-tunggal/> di akses pada tanggal 22 November pukul 14.14 WIB.

<http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/sites/default/files/UANG%20KULIAH%20TUNGGAL%20final.pdf> di akses pada tanggal 22 November 14. 30 WIB.

<http://bandarlampungku.com/artikel.ukt-189-mahasiswa-unila-diturunkan-satu-grade> di akses pada tanggal 22 November 14. 40 WIB.